

PENELITIAN TENTANG PROFIL DAN PEMETAAN
POTENSI MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN DESA SEJAHTERA MANDIRI
(Rangkuman Hasil Pemetaan)



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Penelitian Tentang Profil dan Pemetaan Potensi Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri: Rangkuman hasil Pemetaan; Jakarta 2017: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, x+92 halaman 14,5 x 21 cm.

Editor:

DR. Anggraeni Primawati, M.Si

Penulis:

B. Mujiyadi

M. Syawie

Anwar Sitepu

Suyanto

Ayu Diah Amalia

Perwajahan:

Tim Peneliti

ISBN: 978-602-61471-2-7

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial,
Kementerian Sosial RI - Jakarta
Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang II Jakarta Timur,
Telp. 021-8017146, Fax.021-8017126

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan-Nya Penelitian tentang Profil dan Pemetaan Potensi Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap kebijakan pimpinan Kementerian Sosial dalam rangka melaksanakan program Nawa Cita. Sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, maka kontribusi yang diberikan adalah model pemetaan dalam rangka pengembangan desa sejahtera mandiri. Model pemetaan ini mencakup gambaran tentang profil desa sasaran yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya sosial. Dari sisi sosial ekonomi, pada setiap sampel lokasi akan diidentifikasi produk yang mempunyai daya saing, peluang usaha/pasar, peluang untuk mendapatkan akses pengembangan serta peluang dukungan atas kemandirian usaha/kerja.

Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengenali wilayah operasional kegiatan dan kondisi masyarakat sasaran program yang meliputi: (a) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, (b) Potensi sumberdaya sosial seperti modal sosial (*trust*, kelembagaan, energisosial), kearifan lokal, jaringan komunikasi sosial, dan perilaku masyarakat; (c) potensi konflik sosial; (d) harapan, kebutuhan dan kendala masyarakat dalam pembangunan desanya; dan (e) potensi-potensi ekonomi prospektif/unggulan (keberadaan bahan baku, jumlah produksi, potensi pasar, dan mitra pengembangan).

Selain itu, pemetaan ini juga dimaksudkan sebagai dasar penyusunan rencana kerja, sebagai dasar pendekatan pelaksanaan program kerja, dan sebagai acuan dasar untuk mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat wilayah operasional.

Di samping itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan Pemetaan sosial yang berupa dokumen pemetaan sosial yang berisi data dan informasi tentang: (1) Data Demografi: Jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian, agama, pendidikan, dll; (2) Data Geografi: Topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi, pengaruh lingkungan geografis terhadap kondisi sosial masyarakat, dll; (3) Data Psikografi: Nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, kebiasaan - kebiasaan, adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan sosial yang ada, motif yang menggerakkan tindakan masyarakat, pengalaman-pengalaman masyarakat terutama terkait dengan mitigasi bencana, pandangan, sikap, perilaku terhadap intervensi luar, kekuatan sosial yang paling berpengaruh, modal sosial, kearifan lokal, identifikasi kelompok - kelompok rentan, dll; (4) Data stakeholder kunci dan relasi antar stakeholder kunci desa / kecamatan / kabupaten; (5) Pola Komunikasi: Media yang dikenal dan digunakan, bahasa, kemampuan baca tulis, orang yang dipercaya, informasi yang biasa dicari dan tempat memperoleh informasi.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai dasar pengembangan desa sejahtera mandiri yang akan dikembangkan pada tahap selanjutnya.

Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri mengakomodir 4 dari 9 prioritas program pembangunan tahun 2015-2019 yang ada pada Nawa Cita. Keempat program dimaksud meliputi: (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri ini dilaksanakan bersama beberapa perguruan tinggi, yang secara legal telah dikuatkan dengan MoU antara Kementerian Sosial dengan 15 Perguruan Tinggi

yang meliputi (1) Universitas Andalas di Padang, (2) Universitas Jambi di Jambi, (3) Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, (4) Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (5) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (6) Universitas Ciputra Surabaya, (7) Universitas Islam Malang, (8) Universitas Negeri Malang, (9) Universitas Muhammadiyah Malang, (10) Universitas Negeri Jember, (11) Universitas Mulawarman Samarinda, (12) Intitut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (13) Universitas Hasanuddin Makasar, dan (14) Universitas Muslim Indonesia Makasar.

Model pemetaan ini dilaksanakan di empat wilayah sampel yang merupakan bagian dari 100 desa yang menjadi sasaran Pengembangan Desa Sejahtera mandiri. Ke empat wilayah sampel dimaksud meliputi (1) Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; (2) Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang; (3) Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara; dan (4) Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan segala keterbatasannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi unit kerja terkait, pemangku kepentingan dan publik. Pada kesempatan ini, kami juga mengharapakan masukan yang kualitatif bagi penyempurnaan.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penelitian ini.

Jakarta, Mei 2017
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial
Kepala,

Mulia Jonie

PENGANTAR EDITOR

Profil dan pemetaan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan suatu program. Dengan demikian akan dipahami secara utuh kondisi awal suatu sasaran program sebelum dikenai perlakuan.

Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal, sebagaimana dikemukakan Caventa dan Valderama dalam Suhirman (2003) bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki secara kategoris terdiri dari;

- a. Modal manusia yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga.
- b. Modal alam yang meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumberdaya hayati, dan sumber lingkungan hidup.
- c. Modal finansial meliputi sumber sumber keuangan yang ada seperti tabungan, pinjaman, subsidi dan sebagainya.
- d. Modal Fisik meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian.
- e. Modal sosial yakni jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, lembaga kemasyarakatan, prnata sosisla dan tradisi yang mendukung, serta akses kepada kelembagaan sosial yang sifatnya lebih luas.

Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan model identifikasi awal sebelum memberikan perlakuan atas desa yang menjadi sasaran pengembangan desa sejahtera mandiri. Identifikasi ini meliputi (a) Kondisi sosial, ekonomi

dan budaya masyarakat, (b) Potensi sumberdaya sosial seperti modal sosial (*trust*, kelembagaan, energisosial), kearifan lokal, jaringan komunikasi sosial, dan perilaku masyarakat; (c) potensi konflik sosial; (d) harapan, kebutuhan dan kendala masyarakat dalam pembangunan desanya; dan (e) potensi-potensi ekonomi prospektif/unggulan (keberadaan bahan baku, jumlah produksi, potensi pasar, dan mitra pengembangan).

Sampel lokasi penelitian ini memang hanya pada 4 wilayah. Namun demikian model ini dapat diterapkan pada desa-desa lainnya pada 100 desa sasaran program desa sejahtera mandiri. Dengan mengadopsi model ini, kiranya tiap desa yang menjadi sasaran program akan teridentifikasi secara utuh kondisi awal sebelum mendapat perlakuan.

Temuan penelitian dari studi ini dapat digunakan sebagai titik pijak bagi pengembangan model. Selain menemukenali kebutuhan pada tiap desa, didapatkan pula berbagai sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pemecahan masalah yang ada. Melalui sinergisme antara berbagai pihak, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga desa, maka optimalisasi sumber dapat dijangkau sebaik-baiknya. Sumber lain yang juga dapat dimanfaatkan adalah *corporate social responsibility* (CSR) yang mungkin akan berkontribusi pada penanganan masalah. Dari informasi yang didapatkan, pada dasarnya banyak kalangan dunia usaha yang akan berkontribusi. Yang dibutuhkan adalah informasi yang jelas akan maksud dan tujuan dari setiap upaya yang diberikan pada masyarakat sasaran. Tentu saja dunia usaha ini, mempunyai hak untuk berorientasi bahwa *corporate social responsibility* dapat bernuansa *corporate social investment*. Hal ini dapat dimengerti, karena sosok dunia usaha yang tentunya berorientasi pada profit. Dengan memberikan dukungan pada pemberdayaan masyarakat, niscaya kehadiran dunia usaha dimaksud diterima oleh masyarakat dan selanjutnya didapatkan ketenangan kerja bagi dunia usaha

dimaksud. Apabila hal ini tercapai, maka lebih jauh adalah bahwa keuntungan dari pihak dunia usaha juga akan makin signifikan.

Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan desa sejahtera mandiri.

Editor,

DR. Anggraini Primawati, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PENGANTAR EDITOR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : PEMETAAN SOSIAL PADA EMPAT LOKASI SAMPEL	18
A. Data geografi:	18
B. Data ekonomi	22
C. Data demografi	31
D. Data kondisi sosial budaya	39
E. Data Kesehatan	44
F. Data Pendidikan	46
G. Data Psikografis	50
H. Data <i>Stakeholder</i>	53
I. Pola Komunikasi	55
BAB III : HASIL DISKUSI PARA SATUAN KERJA	58
BAB IV : PEMBAHASAN	61
BAB V : REKOMENDASI	79
DAFTAR PUSTAKA	81
SEKILAS PENULIS	83
INDEKS	90

BAB I

PENDAHULUAN

Desa

Desa, merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Meskipun terdapat istilah seperti nagari (Sumatera Barat), Gampong (Aceh), kelurahan (wilayah kota) yang secara umum merupakan tata pemerintahan setingkat desa dimaksud. Di dalamnya terdapat berbagai unsur organisasi termasuk satuan-satuan keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan pedukuhan. Keseluruhan organisasi tersebut merupakan bagian yang secara tata pemerintahan berada dalam tatanan sistem yang disebut desa (untuk wilayah Kabupaten) dan kelurahan (untuk wilayah Kota).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud desa atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dalam Undang Undang tersebut diakui adanya otonomi yang dimiliki Desa. Artinya desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya itu sendiri. Dengan demikian desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam menyelenggarakan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Dengan pemikiran semacam itu maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan pemerintahan desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan empowering. Dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektifitas, efisiensi dan optimalisasi otonomi daerah.

Undang-Undang tentang Desa telah memberi mandat pada masyarakat (Pemerintah atau semua *stakeholders* Pembangunan) untuk menerapkan bahwa desa itu membangun. Amanat tersebut berbunyi bahwa desa-desa pada dasarnya memiliki kekuatan besar, yang perlu diperhitungkan dalam proses transformasi menuju kemajuan (kemandirian), dan kekuatan itu antara lain berupa adat, ulayat, asal usul sejarah, gotong royong (partisipasi), kearifan lokal (*Local wisdom*), kepemimpinan, demokrasi lokal, kepercayaan, magis dan lain-lain yang semua itu dapat dan harus dijadikan sebagai basis kekuatan desa untuk membangun dirinya.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi desa pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya. Kemandirian fungsi desa dalam konteks otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karenanya peningkatan fungsi dan kelembagaan desa memiliki arti yang strategis.

Desa Sejahtera Mandiri

Desa sejahtera mandiri adalah desa yang mampu mengelola kekuatan (asset dan potensi) yang dimiliki serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam pengelolaan pembangunan untuk kesejahteraan warga desa. Desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah dan pihak luar. Kalau ada bantuan

sifatnya hanya *stimulant* atau perangsang saja. Secara umum desa sejahtera mandiri dicirikan antara lain oleh:

1. Kemampuan desa mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.
2. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan (desa bisa merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan pembangunan dan pengawas hasil pembangunan untuk kesejahteraan warga desanya)
3. Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa, termasuk warga miskin, perempuan, kaum muda, kaum difabel, penyandang masalah sosial dan warga yang termarginalkan lainnya.
4. Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh warganya.

Konsep desa sejahtera mandiri mengandaikan adanya sebuah konstruksi pemikiran yang menempatkan “Desa” pada posisi subyek, organisasi sosial yang harus diberi kepercayaan penuh oleh “orang luar” untuk mengatur dirinya, dengan kekuatan dan modal yang ada pada dirinya. Kosep “Desa Sejahtera Mandiri” membutuhkan “cara pandang lain” tentang Desa. Desa perlu dipandang sebagai entitas sosial (kolektif) yang memiliki karakter sosiologis, ekonomis, kultural, dan ekologis yang khas (spesifik) jika dibandingkan misalnya dengan “kota”. Cara pandang ini memandang bahwa desa merupakan tempat di mana kenyamanan, keharmonisan, kerukunan, kedamaian dan ketenteraman, terjaga, sehingga bukan harus bersifat *stereotype*, bahwa desa merupakan tempat dimana segala bentuk ketertinggalan berada. Cara pandang etik (orang luar) terhadap desa, dengan menempatkan kriteria kemajuan (sukses dan sejahtera) atas dasar nilai-nilai formal material, harus diuji dan disinkronkan dengan cara pandang

emik (*local view* orang desa) yang memandang nilai-nilai material (materi) bukan segalanya.

Kementerian Sosial meluncurkan program 100 Desa Sejahtera Mandiri bermitra dengan perguruan tinggi dalam mempercepat Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM). Dalam program Desa Sejahtera Mandiri Kementerian Sosial dan Perguruan Tinggi akan melakukan pendekatan berbasis penataan kondisi perumahan dan ekonomi produktif.

Keberhasilan penerapan program Desa Sejahtera Mandiri salah satunya sangat ditentukan oleh suatu perencanaan matang yang mampu menjawab permasalahan dan mengantisipasi peluang serta tantangan yang muncul secara cermat, dan dalam prosesnya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* termasuk masyarakat dan aparat/perangkat desa, Bagaimana kondisi pembangunan pedesaan saat ini (*existing*) sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan model Desa Membangun melalui pendekatan kewilayahan (spesifik lokasi) dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait dalam mempercepat transformasi (perekonomian) masyarakat perdesaaan yang berkelanjutan.

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Implisit dalam konsep tersebut terkandung adanya syarat partisipasi murni masyarakat perdesaaan dalam pembangunan sebagai subyek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Partisipasi murni harus diartikan bahwa setiap pelaku ekonomi harus ikut serta dalam setiap tahap pembangunan desa sesuai dengan latar belakang, kemampuan atau produktivitasnya dan keahlian masing-masing dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan tenggang rasa untuk kepentingan bersama. Pembangunan yang berorientasi pada unsur manusianya

berarti pula mempersiapkan manusia untuk ikut aktif dalam proses pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable*). Hal itu berarti pembangunan yang diciptakan dari masyarakat sendiri, oleh masyarakat dan untuk semua masyarakat. Dengan demikian setiap anggota masyarakat harus ikut serta dalam setiap tahap pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Sasaran tercapainya desa sejahtera dan mandiri adalah membaiknya kinerja pembangunan di pedesaan, meningkatnya koordinasi antar instansi terkait di semua level pemerintahan dalam pembangunan di pedesaan, meningkatnya keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam pembangunan di pedesaan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga melalui pengembangan usaha produktif di pedesaan, meningkatnya pengelolaan pembangunan desa secara terpadu berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi selama ini disebabkan oleh: 1) Ketidak mandirian pemerintah desa dari struktur pemerintah di atasnya; 2) Praktik pemerintah desa yang belum sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena matinya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluang terjadinya penyalah-gunaan wewenang; 3) Ketidak berdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan desa.

Pengembangan model Desa Sejahtera Mandiri, mengakomodir 4 dari 9 prioritas program pembangunan tahun 2015-2019 yang ada pada Nawa Cita. Keempat program dimaksud meliputi: (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) mempertahankan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Arah kebijakan dari program Nawa Cita (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, adalah penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang komprehensif dan perluasan serta peningkatan pelayanan dasar. Adapun strateginya meliputi: (1) Penataan Asistensi Sosial, (2) Pemenuhan Hak Dasar dan Inklusifitas Penyandang Disabilitas, lanjut usia dan masyarakat marginal, (3) Perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi penduduk miskin dan rentan serta pekerja sektor informal, (4) Penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui penguatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standardisasi kelembagaan kesejahteraan sosial serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu, (5) Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, (6) Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standardisasi dan pengelolaan data terpadu, dan (7) Penguatan peran kelembagaan sosial dalam mengembangkan sistem layanan rujukan terpadu pada tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.

Sedangkan arah kebijakan yang dikembangkan untuk mewujudkan Nawa Cita (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, adalah Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan/Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Adapun strateginya meliputi: (1) Peningkatan Kapasitas dan ketrampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomis produktif, (2) Terbentuknya masyarakat sejahtera mandiri dalam pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan, serta (3) Pengembangan potensi lokal.

Kemudian untuk kebijakan dari program Nawa Cita (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, adalah Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adapun strateginya meliputi: (1) Pengembangan kapasitas keluarga dan peran pendamping dalam pemberdayaan dan pelayanan sosial; (2) Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berbasis institusi, masyarakat dan keluarga; (3) Penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (4) Meningkatkan kualitas lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (5) Penyelenggaraan Penyuluhan Sosial untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembangan kesetiakawanan sosial; (6) Penguatan peran pemerintah pusat, daerah dan berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial; dan (7) Peningkatan jejaring kerja keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial.

Korten (1993) sebagaimana dikutip oleh dan Fajar Suharman menyatakan bahwa pembangunan adalah proses dimana anggota - anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusi mereka untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Dalam konteks penguatan kelembagaan diperlukan perubahan struktural terhadap kelembagaan lokal menuju peningkatan taraf hidup, produktivitas, kreativitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan agar senantiasa survival dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang melingkupinya. Transformasi yang demikian sedapat mungkin dilakukan secara mandiri dan atas kebutuhan masyarakat sendiri. Kalaupun ada intervensi dari pihak lain hanya sifatnya memfasilitasi.

Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal, sebagaimana dikemukakan Caventa dan Valderama dalam Suhirman (2003) bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki secara kategoris terdiri dari;

- a. Modal manusia yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga.
- b. Modal alam yang meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumberdaya hayati, dan sumber lingkungan hidup.
- c. Modal finansial meliputi sumber sumber keuangan yang ada seperti tabungan, pinjaman, subsidi dan sebagainya.
- d. Modal Fisik meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian.
- e. Modal sosial yakni jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, lembaga kemasyarakatan, prnata sosisla dan tradisi yang mendukung, serta akses kepada kelembagaan sosial yang sifatnya lebih luas.

Di lain pihak, terdapat berbagai macam kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pembangunan antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia,
- b. Keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik,
- c. Lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang ada jasa dan perdagangan,
- d. Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber - sumber kemajuan ekonomi yang antara lain meliputi; akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.

Sementara itu, Kemiskinan memang merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik. Untuk itu tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan

diobjektifkan dalam bentuk angka-angka. Ini seperti halnya dengan pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang hingga kini menjadi perdebatan. Dengan kata lain, tidaklah mudah untuk menentukan berapa rupiah pendapatan yang harus dimiliki oleh setiap orang agar terhindar dari garis batas kemiskinan. Jadi dalam hal ini kemiskinan tidak saja menyangkut persoalan-persoalan kuantitatif tetapi juga kualitatif. Sebab di dalam masyarakat kadang ada orang yang secara kuantitatif atau objektif (apabila dihitung pendapatannya dengan rupiah) tergolong miskin tetapi karena tinggal dalam lingkup budaya tertentu, orang tersebut merasa tidak miskin. Bahkan merasa cukup dan justru berterima kasih pada nasibnya. Hal ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai budaya tertentu seperti nilai-nilai nrimo, takdir, nasib dan lain-lain.

Perdebatan tentang otonomi desa hingga kini selalu menjadi topik yang sangat menarik. Perbincangan tentang desa bukan saja soal kemiskinan melainkan tentang perdebatan sistem penyelenggaraan pemerintahannya yang tak kunjung ada habisnya. Dalam penyelenggaraan pemerintah di level manapun tentu dibutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat. Demikian halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi adalah kunci bagi berjalannya pemerintahan desa untuk mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, budaya maupun hukum yang benar-benar memberdayakan dan melindungi rakyat (Moch. Solekhan, 2012).

Memasuki tahun 2015, kita telah berada dalam fase pelaksanaan anggaran untuk APBN 2015. Pelaksanaan anggaran adalah fase ketika segala sumber pendanaan APBN diimplementasikan sesuai dengan arah kebijakan, termasuk kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. Alokasi APBN untuk dana desa menjadi pos pendapatan bagi keuangan desa dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Alokasi dana desa diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat upaya untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yang makin merata. Mengingat APBN 2015 merupakan tahun pertama dialokasikannya dana desa, penting bagi kita untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut (Muksin, 2015). Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sisi orientasi terhadap masyarakat terkandung makna bahwa alokasi dana desa didesain memenuhi tujuan pemberdayaan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan begitu, ia diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa. Masyarakat desa jadi sasaran utama dalam manajemen alokasi dana desa ini. Karena itu, pemanfaatan dana desa hendaknya memfasilitasi adanya partisipasi dan interaksi masyarakat desa di dalamnya hingga manfaatnya sampai kepada masyarakat desa, baik langsung maupun tidak langsung.

Secara potensial setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut. Potensi kesejahteraan sosial tersebut ada dalam bentuk sumber daya alami, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial yang berupa kemampuan mengorganisir sumber daya alam atau manusia atau perpaduan keduanya. Untuk mempertahankan kehidupannya, masyarakat memanfaatkan dan mengorganisasikan semua sumber daya ini dalam berbagai aktivitas seperti aktivitas ekonomi, politik, keagamaan, kesenian, gotong royong dan sebagainya. Pemanfaatan dan pengorganisasian aktivitas ini diistilahkan sebagai lembaga (institusi) sosial. Pengertian lembaga di sini mencakup bentuk-bentuk organisasi/kelompok kongkrit dan pranata sosial. Masyarakat lokal dalam lembaga sosialnya, mengorganisir diri untuk mengelola sumber

daya alam, sumber daya manusia dan uluran tangan pihak luar (pemerintah atau swasta) yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara umum mengatasi masalah kesejahteraan sosial secara khusus. Kemampuan setiap lembaga sosial untuk melindungi masyarakatnya dari setiap masalah kesejahteraan sosial ditentukan oleh norma, kelakuan berpola, peralatan dan anggota masyarakat pendukung lembaga tersebut (Koentjaraningrat, 2004).

Kondisi kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai oleh tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran, angka putus sekolah dan kondisi rumah yang boleh dikatakan tidak layak huni. Menurut The World Bank (Bank Dunia) kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana orang banyak mengalami hambatan untuk memperoleh kesejahteraannya. Kondisi ini termasuk ketidakcukupan akan konsumsi, kerawanan terhadap risiko yang mengancam kehidupan, terbatasnya pendidikan, kurangnya pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kesehatan, infrastuktur yang gagal menyediakan kebutuhan sehari-hari (air bersih dan perumahan) serta rendahnya kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial politik (Mukherjee, 2002, dalam Ani Wuryandari, 2010).

Sementara itu, ketahanan sosial (*social resilience*) merupakan suatu kondisi masyarakat yang dicita-citakan. Adapun masyarakat yang berketahanan sosial adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam: pertama, memberikan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin dan penyandang masalah sosial. Kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial. Ketiga, melakukan pengendalian terhadap konflik sosial dan tindak kekerasan, dan keempat, menggali kearifan dalam memelihara sumber daya alam dan sosial (Nuryana, 2002). Sehubungan dengan hal ini, tinggi rendahnya ketahanan sosial suatu masyarakat atau komunitas cenderung akan ditentukan oleh efektif tidaknya mereka dalam (1) melindungi anggotanya, (2) menanamkan investasi sosial dalam jaringan, (3) mengelola konflik dan kekerasan.

Model Pemberdayaan Pranata Sosial dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat yang diukur dari 4 indikator Tansosmas:

1. Kemampuan masyarakat dalam melindungi warganya yang rentan atau terkena masalah sosial lainnya
2. Partisipasi masyarakat dalam berorganisasi sosial
3. Kemampuan masyarakat dalam mencegah dan mengelola / mengendalikan tindak konflik sosial dan tindak kekerasan
4. Kemampuan masyarakat dalam memelihara kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial (Kepmensos No:12/HUK/2006 Tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial).

Desa sejahtera mandiri adalah desa yang mampu mengelola kekuatan (asset dan potensi) yang dimiliki serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam pengelolaan pembangunan untuk kesejahteraan warga desa. Desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah dan pihak luar. Kalau ada bantuan sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Secara umum desa sejahtera mandiri dicirikan antara lain oleh:

1. Kemampuan desa mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.
2. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan (desa bisa merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan pembangunan dan pengawas hasil pembangunan untuk kesejahteraan warga desanya)
3. Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa, termasuk warga miskin, perempuan, kaum muda, kaum difabel, penyandang masalah sosial dan warga yang termarginalkan lainnya.

4. Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruharganya.

Dalam kerangka konsep yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan, Kementerian Sosial, pengertian Desa Sejahtera Mandiri adalah Desa Sejahtera Mandiri atau Masyarakat Sejahtera Mandiri yakni desa yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, lembaga sosial yang aktif, tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat tinggi dan masyarakat miskin terlibat aktif dalam rantai produksi.

Desa Sejahtera Mandiri yang masyarakatnya memiliki indikator kemauan dan kemampuan memanfaatkan secara kreatif dan inovatif seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas perdesaan. Melalui Desa Sejahtera Mandiri, maka akan tersedia lapangan kerja yang menyerap usia produktif, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia masyarakat desa, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat desa, digunakan SDA dan SDM dari desa sendiri, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat desa, menguatnya ikatan sosial masyarakat desa serta ada kelembagaan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pemetaan masalah dan potensi sebagai salah satu upaya penjangkauan DSM

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara garis besar dikelompokkan dalam 5 besaran yang meliputi:

1. Bagaimana kondisi desa sasaran
2. Produk yang mempunyai daya saing
3. Lembaga sosial yang aktif
4. Tingkat partisipasi masyarakat
5. Akses pemberdayaan

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang profil desa sasaran yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya sosial. Dari sisi sosial ekonomi, pada setiap sampel lokasi akan diidentifikasi produk yang mempunyai daya saing, peluang usaha/pasar, peluang untuk mendapatkan akses pengembangan serta peluang dukungan atas kemandirian usaha/kerja.

Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengenali wilayah operasional kegiatan kondisi masyarakat sasaran program yang meliputi:
 - a. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
 - b. Potensi sumberdaya sosial:
 - Modal sosial (*trust*, kelembagaan, energisosial)
 - Kearifan lokal
 - Jaringan komunikasi sosial
 - Perilaku masyarakat
 - c. Potensi konflik sosial
 - d. Harapan, kebutuhan dan kendala masyarakat dalam pembangunan desanya
 - e. Potensi-potensi ekonomi prospektif/unggulan (keberadaan bahan baku, Jumlah produksi, potensi pasar, dan mitra pengembangan)
2. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja
3. Sebagai dasar pendekatan pelaksanaan program kerja
4. Sebagai acuan dasar untuk mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat wilayah operasional.

Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan Pemetaan sosial yang berupa dokumen pemetaan sosial yang berisi data dan informasi tentang:

1. Data Demografi: Jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian, agama, pendidikan, dll.
2. Data Geografi: Topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi, pengaruh lingkungan geografis terhadap kondisi sosial masyarakat, dll.
3. Data Psikografi: Nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, kebiasaan – kebiasaan, adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan sosial yang ada, motif yang menggerakkan tindakan masyarakat, pengalaman-pengalaman masyarakat terutama terkait dengan mitigasi bencana, pandangan, sikap, perilaku terhadap intervensi luar, kekuatan sosial yang paling berpengaruh, modal sosial, kearifan lokal, identifikasi kelompok – kelompok rentan, dll.
4. Data *stakeholder* kunci dan relasi antar *stakeholder* kunci desa/kecamatan/kabupaten.
5. Pola Komunikasi: Media yang dikenal dan digunakan, bahasa, kemampuan baca tulis, orang yang dipercaya, informasi yang biasa dicari dan tempat memperoleh informasi.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai dasar pengembangan desa sejahtera mandiri yang akan dikembangkan pada tahap selanjutnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan PRA -*Participatory Rural Appraisal*- Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PRA) adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata. Metode dan pendekatan ini semakin meluas dan diakui kegunaannya ketika paradigma pembangunan berkelanjutan mulai dipakai sebagai landasan pembangunan di Negara-negara berkembang. Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, manusia ditempatkan

sebagai inti dalam proses pembangunan. Manusia dalam proses pembangunan tidak hanya sebagai penonton tetapi mereka harus secara aktif serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan juga menikmati hasil pembangunan. Metode dan pendekatan yang tampaknya sesuai dengan tuntutan paradigma itu adalah metode dan pendekatan yang partisipasif. Dengan penggunaan metode ini, responden dilibatkan sejak identifikasi siapa dirinya, apa masalahnya, apa potensinya, akses apa yang dapat digunakan untuk pemberdayaan serta menemukan hambatan-hambatan yang mungkin ada. Pelibatan ini dilaksanakan melalui kegiatan semacam musyawarah desa/musyawarah kelurahan dengan maksud untuk menemukan bagaimana kondisi sosial ekonomi mereka, produk di desanya yang secara potensial memiliki daya saing, akses yang mungkin dapat digunakan serta potensi dan sumber yang ada di sekitarnya. Data diperoleh dengan wawancara mendalam (*In depth interview*), observasi, FGD dan triangulasi.

Sampel lokasi:

Lokasi terpilih dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* berdasarkan informasi dari Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, dengan pertimbangan lokasi-lokasi dimaksud adalah menjadi bagian dari 100 desa terpilih yang akan menjadi sasaran pengembangan desa sejahtera mandiri.

Adapun keempat lokasi dimaksud adalah:

1. Jawa Timur
2. Kalimantan Timur
3. Sulawesi Selatan
4. Jambi

Pelaksana

Narasumber / Konsultan : 1. Dr Marjuki, MSc, SAM Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

2. Dr. Anggraeni Primawati, M.Si, Universitas Nasional, Jakarta

Ketua : Drs. B. Mujiyadi, MSW

Anggota

: 1. Drs. M. Syawie, M.S

2. Drs Anwar Sitepu, M.P

3. Ayu Diah Amalia, S.Sos, M.Kesos

4. Drs. Suyanto

BAB II

PEMETAAN SOSIAL PADA EMPAT LOKASI SAMPEL

Pemetaan Sosial pada empat lokasi sampel menghasilkan data dan informasi sebagai berikut:

A. Data geografi:

1. Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

Pemaluan yang mempunyai area seluas 133,97 Km² ini terletak di posisi yang paling pinggir dari kecamatan Sepaku dan sekaligus sebagai pintu utama masuk wilayah kecamatan apabila didatangi dari pusat kabupaten. Lokasinya berjarak sekitar 83,5 km dari ibukota kabupaten dan 8,5 km dari pusat kecamatan. Wilayah ini tanahnya berbukit-bukit dan mempunyai iklim yang relatif kering.

Wilayah ini berbatasan dengan desa Bumi Harapan di sebelah utara, desa Mentawir di sebelah timur, desa Binuang di sebelah selatan, dan desa Riko (kecamatan Penajam) di sebelah Barat.

Akses untuk menjangkau Sepaku relatif mudah, yakni berupa jalan aspal. Namun demikian, karena kondisi jalan yang rusak berat, maka untuk menjangkau wilayah ini memerlukan waktu hampir 3 jam dari ibukota kabupaten. Wilayah ini merupakan jalan alternatif menuju Balikpapan, di samping melalui pelabuhan Penajam. Adapun sarana angkutan umum, terdapat kendaraan angkutan dari kabupaten maupun kecamatan, meski frekuensinya cukup jarang.

Curah hujan di wilayah ini relatif sering (disebutkan 18,82mm), serta tidak mengenal batas yang nyata antara musim penghujan dan musim kemarau. Oleh karenanya di wilayah

ini kebutuhan akan air untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk tumbuhnya tanaman dapat dikatakan terpenuhi.

2. Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

Pandansari mempunyai area seluas 951 Ha, yang terbagi pemanfaatannya meliputi:

- Tegal / ladang : 592 Ha
- Sawah : 4 Ha
- Pemukiman Penduduk : 121 Ha
- Pekarangan : 27 Ha
- Perumahan : 94 Ha
- Hutan lindung : 217 Ha
- Fasilitas umum : 5 Ha
- Lain - lain : 8 Ha

Wilayah ini berada di dataran tinggi dan berada di lereng Gunung Bromo. Akses jalan ke wilayah ini relatif baik, dan menjadi salah satu alternatif menuju daerah wisata gunung Bromo. Dari desa menuju kota kecamatan relatif dekat, hanya sekitar 7 km. Demikian juga untuk menjangkau ibukota kabupaten hanya 28 km, dan dapat dijangkau dengan kendaraan darat selama kurang lebih satu jam.

3. Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Wilayah Desa Borisallo terletak 400 meter di atas permukaan laut. Topografi wilayah tampak berbukit-bukit. Wilayah Desa ini dilalui oleh sungai Parangloe, di mana terdapat air terjun yang disebut juga batimurung.

Secara administratif Borisallo termasuk dalam Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Borisallo

merupakan salah satu dari tujuh desa di kecamatan Parangloe. Wilayah desa ini dilalui oleh jalan raya poros Makassar dan Somba Opu ke Malino atau sebaliknya. Malino adalah sebuah kawasan wisata dengan hawa sejuk. Jarak Borisallo dari / ke ibu kota provinsi, Makassar 51 km. ke kota kabupaten, Somba Opu 41 km. Di wilayah Borisallo sudah tersedia prasarana penerangan, listrik PLN, dan jaringan telekomunikasi.

Secara administratif, wilayah Borisallo dibagi dalam dua dusun, yaitu Dusun Bontojai dan Pakkolompo. Kantor Kepala Desa dan pasar terdapat di Dusun Bontojai, wilayah desa yang dilintasi oleh jalan raya poros Makassar - Malino. Sementara Dusun Pakkolompok terletak sekitar 4 kilometer ke arah dalam dari jalan raya tersebut. Kondisi jalan menuju dusun Pakkolompo kurang baik, sehingga sulit dilalui kendaraan. Muhammad, seorang tokoh yang ikut dalam diskusi, untuk menggambarkan kondisi jalan ke Dusun Pakkolompok mengatakan: “sangat iba, jalan saja masih sulit”.

Pemerintah Desa tidak memiliki data akurat terkait pemanfaatan lahan di seluruh wilayahnya, misalnya luas hutan, sawah, ladang, pemukiman dan prasarana umum. Informasi yang berhasil diperoleh adalah sawah yang terdapat di desa tersebut meliputi luas 483 ha. Menurut system irigasinya, sawah seluas tersebut terbagi dua, pertama, merupakan sawah dengan irigasi setengah teknis seluas 125 ha dan kedua, selebihnya meliputi 358 ha merupakan sawah tadah hujan. Sawah dengan irigasi setengah teknis memperoleh air dari dam yang dibangun di Sungai Parangloe pada tahun 2013. Akan tetapi data berbeda ditampilkan oleh Tim KKN Tematik Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dalam laporannya, seperti pada table di bawah.

Tabel Luas Lahan Pertanian Desa Borisallo

NO	KATEGORI LAHAN	LUAS (ha)
I Tanah Basah		
1	Sawah dan Ladang	652,62
2	Irigasi Setengah Taknis	40,2
3	Sawah Pasang surut	250.40
II Tanah Kering		
1	Perladangan	152,81
2	Tegalan	209.30

Sumber: Ilham Ade Gunawan, dkk (2015). Laporan KKN Tematik DSM UMI di Desa Borisello, Kec. Parangloe, Kab.Gowa.

4. Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Keadaan lahan di desa Nyogan bagian Utara memiliki wilayah tanah yang subur dengan kultur tanah yang berbukit dengan lembah-lembah kecil di sela perkebunan rakyat dan dialiri jalur sungai kecil. Sedangkan di bagian Selatan memiliki kultur tanah sedikit landai atau datar dengan dilewati sungai besar, salah satunya adalah sungai Bahar dan Sungai Panerokan. Sebagian besar lahan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam, seperti kebun karet dan kebun sawit, sebagaian kecil lagi untuk lahan palawija dan tanaman sayur. Kemudian di bagian Timur merupakan lahan Perkebunan Karet, dan terdapat batu bara namun sampai saat ini belum dibuka dan di bagian Barat wilayah ini merupakan dataran rendah dan daerah rawa.

Desa Nyogan secara kewilayahan dibagi menjadi 4 Dusun, Dusun Nyogan, Dusun Selapik, Jerat harimau dan dusun Nebang Para. Nyogan terdiri dari 16 Rt. Dusun Nyogan meliputi 4 Rt, yaitu Rt 01,02,13, dan Rt 15. Dusun Jerat Harimau terdiri

dari 4 Rt, yaitu Rt 07, 08, 09 dan Rt 12. Dusun Nebang Perak terdiri dari 2 Rt, yaitu Rt 11 dan Rt 14. Sedangkan dusun selapik terdiri dari 5 rt, yaitu Rt. 03,Rt 04,05, 06 dan Rt 16. Luas desa Nyogan 7.872,13 ha.

Adapun luas lahan menurut status pemilikannya adalah milik masyarakat seluas 6.750 ha (85 persen), milik adat/desa ada 20 ha (2,5 persen), milik negara 2 ha (0,2 persen), dan milik swasta sebesar 1.100 ha (12,3 persen). Jumlah keseluruhan 7.872 ha. Aset/kekayaan Desa Nyogan (RPJM-Des 2010-2015) adalah: tanah TKd kebun karet ada 4,5 ha; tanah adat 20 ha (untuk pemukiman); Balai Desa 0,25; tanah makam 4 ha; tanah kosong 50 ha; lapang olah raga (bola kaki) 1 ha, masjid 2 ha; pasar 0,5 ha dan tanah sekolah 2 ha (SD,SMP dan TK).

B. Data ekonomi

1. Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

Wilayah ini sebagian besar merupakan dataran tinggi. Sebagian besar wilayah digunakan sebagai area perkebunan yang merupakan usaha yang dikelola oleh perusahaan perkebunan swasta yang dimiliki oleh pihak luar desa. Produk perkebunan yang terbesar adalah kelapa sawit, dan sebagian adalah pinus sebagai bahan dasar kertas.

Bagi warga desa setempat, nafkah utama didapatkan dari bercocok tanam juga, yakni sebagian dari usaha tanam pangan sawah tadah hujan (bukan irigasi), dan sebagian lainnya berusaha menyesuaikan dengan jenis tanaman perkebunan dan sekaligus membuka usaha/kerja sebagai petani plasma untuk kelapa sawit. Sebagian penduduk juga memiliki sambilan usaha peternakan. Sisanya bekerja di sektor non formal, yakni dagang kecil-kecilan serta perbengkelan kendaraan bermotor.

Pasar berada wilayah yang cukup strategis, dan dengan demikian memudahkan warga untuk melakukan aktivitas jual beli keperluan sehari-hari. Namun demikian, pasar ini hanya beroperasi seminggu sekali, kecuali kios-kios kecil yang menyediakan bahan pemenuhan kebutuhan kecil-kecilan sehari-hari.

2. Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

Wilayah Pandansari merupakan daerah yang berada di lereng gunung Bromo. Kondisi ini membawa warga setempat untuk bekerja dan berusaha dengan memanfaatkan peluang dan potensi alam setempat. Dengan kebijakan Pemerintah Kecamatan Poncokusumo, yang mengajak warganya untuk menunjang sosial-ekonomi masyarakat, maka ditetapkan daerah ini menjadi daerah ekonomi yang bercorak agrowisata. Atas dasar itu, maka desa ini mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan yang menunjang kebijakan dimaksud. Tanaman apel serta buah-buahan lainnya dan cocok tanam bunga menjadi pilihan utama warga masyarakat. Oleh karenanya, kegiatan pertanian dan perkebunan berkonsentrasi pada jenis tanaman dimaksud. Alasan pemerintah setempat adalah bahwa dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada, yakni dengan tingginya angka kunjungan wisata ke daerah wisata Gunung Bromo. Dengan kebijakan ini, maka kondisi sosial ekonomi warga masyarakat di wilayah ini terangkat secara signifikan.

Disebutlah adanya pertanian dan perkebunan “on farm” dan “off farm”. Untuk yang on farm, warga diajak untuk bercocok tanam sebanyak mungkin agar menuai panen yang banyak. Sedangkan untuk off farm, lebih diupayakan pada pengemasan produk pertanian dan perkebunan dimaksud dengan kemasan yang membuat bertambah tingginya nilai jual dari produk yang ada, apel yang dipanen, bukan saja dijual dalam wujud

apel glondongan, melainkan diolah menjadi wujud sari buah, keripik apel, serta manisan yang dengan demikian menjadikan penghasilan bertambah.

Demikian pula untuk usaha pertanian tanaman bunga. Sebagian petani di daerah ini mengembangkan budidaya tanaman bunga crisant, mawar serta jenis bunga lain yang menurut informasi dari petani dimaksud, pemasarannya bukan hanya di daerah setempat, melainkan hingga menjangkau Bali dan bahkan Kalimantan.

Jenis tanaman lainnya adalah budi daya tanaman tebu serta rumput gajah yang relatif mudah untuk dipasarkan. Untuk tebu, dipasarkan ke pabrik gula yang ada di kota Malang. Sedangkan untuk tanaman rumput gajah, lebih banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak warga setempat.

Untuk usaha peternakan, warga masyarakat beternak sapi baik untuk jenis peranakan, penggemukan maupun untuk produksi susu.

Secara geografis, daerah ini berada di daerah yang relatif mudah dijangkau. Akses jalan yang ada, hingga pelosok desa sudah memiliki jalan yang telah diperkeras. Dengan demikian akses untuk lalu lintas ke wilayah ini dari dan ke daerah luar relatif mudah. Demikian juga untuk pengangkutan produk setempat dengan mudah dapat dilakukan.

Selain itu, untuk menunjang perekonomian di Desa Pandansari ada sarana Toko/warung/kios jumlahnya mencapai 135 unit (seperti adanya restoran/rumah makan dan kedai makanan dan minuman sebanyak 12 unit), industri kecil/industri rumah tangga/industri kerajinan seperti industri kayu 4 unit, gerabah/anyaman/ keramik 2 unit, kain tenun 1 unit dan makanan 6 unit dan lainnya 63 unit (seperti: Bengkel, servis

elektronik, penjahit, salon kecantikan dan lainnya). Sumber (Kecamatan Poncokusumo Dalam Angka tahun 2014).

3. Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Mata pencaharian penduduk Desa Borisallo pada umumnya adalah bertani. Menurut catatan pemerintah Desa setempat, sebanyak 2.204 dari 2383 angkatan kerja bekerja sebagai petani. Penduduk lainnya bekerja sebagai pedagang (72 orang), PNS/Polri (30 orang), karyawan swasta (10 orang) dan jasa seperti supir, tukang jahit dan tukang bangunan (67 orang).

Tanaman yang banyak ditanam penduduk setempat adalah padi, kacang-kacangan. Di samping itu di lahan kering penduduk juga menanam tanaman-tanaman keras seperti: mangga, rambutan, coklat, durian, nangka dan kayu-kayuan. Petani di Desa ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: petani pemilik lahan dan petani penggarap (petani tanpa lahan). Petani penggarap menggunakan lahan milik warga lain untuk bertani dengan system bagi hasil, biasanya sawah, dimana hasil panen dibagi dua, satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk penggarap, setelah dikurangi biaya produksi.

Pemerintah Desa tidak memiliki data komposisi penduduk pemilik lahan dan penduduk tanpa lahan, akan tetapi dalam diskusi terfokus, seluruh peserta sepakat membuat perkiraan bahwa petani pemilik lahan meliputi 30 persen dan petani penggarap meliputi 70 persen. Kondisi sangat memperhatikan, sebagian terbesar penduduk desa yang hidup dari pertanian ternyata tidak memiliki lahan, sebagai faktor produksi. Mata pencaharian lain yang dilakukan penduduk adalah beternak sapi. Akan tetapi, kedua sumber penghidupan ini belum dilakukan cukup optimal.

Tanaman padi misalnya dinilai belum menghasilkan panen optimal. Demikian juga tanaman keras. Kendala yang terungkap – khususnya tanaman padi - adalah:

- a) Keterbatasan system pengairan. Sistem bertani sawah dengan irigasi setengah teknis relatif memberi hasil lumayan karena dapat ditanami dengan tiga musim tanam setiap tahun. Sementara sawah yang tidak memiliki irigasi teknis (tadah hujan) hanya bisa ditanami padi dengan satu kali musim tanam setiap tahun.
- b) Kendala lain yang membuat produktifitas sawah rendah adalah system tanam atau cara bercoocok tanam. Dalam diskusi terungkap bahwa kebanyakan petani menanam dengan sistem “tabur benih langsung” (disingkat tabela). Sistem ini dinilai memberi hasil kurang optimum jika dibanding dengan system pemindahan bibit, namun dilakukan oleh banyak petani. Alasan mereka adalah tidak ada tenaga kerja karena masing-masing petani pada saat bersamaan sibuk mengurus usaha taninya sendiri. Alasan kedua adalah kekurangan modal baik untuk tenaga maupun pengadaan pupuk.
- c) Hama. Hama yang dirasakan sangat mengganggu adalah binatang liar seperti babi hutan, monyet dan burung. Lahan pertanian desa ini berbatasan dengan hutan milik Negara, di mana burung, babi hutan dan monyet masih hidup. Ketiga jenis binatang ini selalu datang mengganggu tanaman petani apabila tidak dijaga.
- d) Kendala lain adalah ternak. Di desa ini banyak penduduk memelihara sapi, akan tetapi sapi dibiarkan lepas, sehingga mengganggu tanaman warga lainnya.

Berdasarkan diskusi terungkap bahwa tradisi bertani para petani setempat masih cenderung seadanya. Artinya belum cukup ditekuni dengan mengerahkan upaya optimal. Dikatakan demikian karena kendala yang dihadapi tersebut semestinya bisa dicarikan jalan keluarnya. Menurut peserta

babi hutan misalnya bisa diatasi anatar lain dengan membuat pagar sekeliling kebun. Terkait system pemeliharaan sapi, sesungguhnya pemerintahan desa sudah menerbitkan peraturan desa (perdes) pada tahun 2012, yang intinya mengatur pemeliharaan sapi tidak boleh dilepas, akan tetapi belum dapat ditegakkan secara konsekuen.

Kegiatan ekonomi lain yang menonjol di desa ini adalah pertambangan golongan C, yaitu pasir dan batu. Kegiatan penggalian dilakukan di sungai Borisallo. Sehari-hari kegiatan penggalian dan pengangkutan material pasir dan batu tampak sibuk. Tambang pasir dan batu di wilayah desa ini sepertinya merupakan sumber utama pemenuhan kebutuhan material untuk pembangunan fisik seperti jalan dan gedung di daerah sekitarnya, terutama kota Makassar dan Somba Opu. Setiap hari tampak truk-truk besar hilir mudik mengangkut material ke arah Kota Makassar. Sejumlah penduduk Desa Borisallo ikut bekerja sebagai buruh dalam usaha tambang ini. Penghasilan yang diterima sebagai buruh di usaha tambang adalah sebesar Rp.60.000 per hari.

Kegan ekonomi berikutnya adalah perdagangan khususnya rumah makan. Di desa ini terdapat lima rumah makan, yang berjejer di seputar jembatan, yang tampak selalu ramai disinggahi pengendara kendaraan pribadi yang melintas, untuk makan dan beristirahat sejenak. Letak desa ini berada sekitar pertengahan pada jalan poros sepanjang 100-an km yang menghubungkan Kota Makassar ke kota wisata berhawa sejuk Malino di bagian utara. Perjalanan yang relative jauh dengan kondisi jalan yang berliku dan rusak di sejumlah titik dan kepadatan arus lalu lintas kiranya cukup menguras tenaga. Letak Borisallo yang berada di sekitar pertengahan kiranya menjadi salah satu alasan mereka untuk beristirahat dan makan di rumah makan di desa ini.

Peserta diskusi sepakat bahwa kecenderungan yang berkembang terkait mata pencaharian adalah dimana kaum muda enggan bekerja sebagai petani. Pemuda setempat lebih memilih bekerja di daerah lain walaupun pekerjaan di daerah lain adalah juga sebagai buruh, seperti menjadi buruh di perkebunan di Kalimantan atau buruh pabrik di kota di Jawa. Sebagian bahkan memilih bekerja di luar negeri, menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Terungkap bahwa “bekerja” bagi warga masyarakat Borisallo berarti menerima upah dari orang lain. Oleh karena itu, bertani seperti yang umum dilakukan penduduk setempat belum atau tidak termasuk dalam kategori “bekerja”.

Lembaga ekonomi penting yang terdapat di desa ini adalah pasar desa dan perusahaan pertambangan. Pasar desa Borisallo merupakan pasar mingguan yang buka dua kali setiap minggu, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat. Penduduk setempat menggunakan pasar sebagai pusat transaksi kebutuhan sehari-hari dan produk pertanian dan produk kehutanan. Produk kehutanan yang khas dihasilkan penduduk desa ini adalah gula merah dan madu. Gula merah diolah dari air nira. Terdapat dua puluhan keluarga yang mengusahakan pengolahan air nira menjadi gula merah.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan tidak ditemukan di desa ini. Menurut peserta diskusi, pada masa lalu di desa ini ada Koperasi Unit Desa (KUD) akan tetapi tidak dapat bertahan. Untuk kebutuhan pinjaman uang, biasanya penduduk setempat menggunakan bank, yaitu BRI, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan apa yang disebut koperasi harian. Pinjaman dari BRI yang lazim dimanfaatkan warga setempat adalah yang dikenal dengan kredit usaha rakyat (KUR). Sementara itu SPP merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Sama seperti di daerah lain, SPP menyalurkan pinjaman kepada perempuan

secara berkelompok untuk tujuan produktif. Pinjaman disalurkan setiap tahun sekali, setelah itu dikembalikan dengan cara mencicil setiap bulan sekali selama 12 bulan.

Menurut informasi dari peserta diskusi SPP dirasakan membantu memenuhi kebutuhan pinjaman. Tentang manfaat SPP, seorang peserta mengatakan: “tidak bias membayangkan (kehidupannya), seandainya tidak ada SPP”. Hal ini berarti begitu penting sumber pinjaman yang murah dan mudah. Namun system pinjaman SPP juga dikritis oleh peserta lain. “saya tidak dapat memperoleh pinjaman dari SPP karena peserta lain tidak membayar”. Ditegaskan bahwa yang tidak membayar cicilan tersebut justeru ketuanya sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa pemimpin – seperti pada kasus ini – ada kalanya justeru tidak memberi contoh yang baik. Efeknya merugikan warga lainnya. Peserta diskusi tidak memiliki informasi jelas tentang kelanjutan lembaga/program ini, sebagian dari mereka mengatakan program ini sudah akan dihentikan tahun ini.

Akan tetapi SPP dinilai tidak mampu melayani kebutuhan karena hanya dapat diakses secara berkelompok dan sifatnya terbatas setahun hanya satu priode penyaluran. Hal lain dari SPP adalah bahwa tidak seperti namanya, simpan pinjam perempuan, dalam kenyataannya SPP tidak menyelenggarakan kegiatan simpanan, jadi hanya sebatas penyaluran pinjaman dan menerima cicilan. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat tidak dididik menabung dan sisi lain SPP tidak menggalang modal setempat. Lebih jauh, dengan demikian SPP tidak atau sekurangnya belum membangun kekuatan mandiri masyarakat. Masyarakat tergantung pada sumber modal dari luar, dana dari program pemerintah. Oleh karena tidak ada fasilitas lain untuk memperoleh pinjaman mudah dan murah banyak warga setempat menggunakan “Koperasi Harian” sebagai sumber pinjaman. Menurut peserta diskusi, hamper

semua pedagang menggunakan koperasi harian sebagai sumber pinjaman setiap kali memerlukan. Persoalannya adalah biaya pinjaman pada koperasi harian relative sangat mahal. Pinjam sebesar Rp.500.000- dipotong biaya administrasi Rp.25.000. Dibayar kembali dengan cara mencicil setiap hari terhitung mulai besoknya, selama 30 hari, yaitu sebesar Rp.20.000 per hari system flat. Artinya, biaya bunga cukup tinggi, lebih dari 25 persen per bulan.

4. Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Nyogan secara umum ada kecenderungan mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan tambahan sungguhpun dengan pendapatan yang tidak dapat dipastikan, namun peluang usaha tersebut bersumber dari pinjaman modal usaha dari pemerintah, seperti dana SPP dari program PNPM, dan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat dari bank penyalur KUR seperti dari BRI, Bank Mandiri atau Badan Usaha Lembaga Keuangan lainnya.

Berikut ini informasi data mata pencaharian penduduk Desa Nyogan: petani (karet) ada 760 orang, buruh tani ada 453 orang; karyawan ada 40 orang; wiraswasta 222 orang; nelayan 400 orang; pertukangan 25 orang dan jasa 72 orang. Komoditi andalan terbesar yang dihasilkan dari desa Nyogan adalah karet, karena 65 persen dari luas wilayah desa Nyogan adalah perkebunan karet, kemudian 35 persen berupa komoditi sawit. Disamping itu, juga menghasilkan tanaman palawija seperti cabe, terong, kacang dan sayur-sayuran serta tanaman jagung (Monografi desa 2015 dan RPJM-Des 2010-2015).

Kegiatan ekonomi yang menonjol: perkebunan kelapa sawit (orang luar), perkebunan karet (penduduk setempat),

pertambangan batu bara (dari luar), transportasi (bahan baku dan produk pertanian dan tambang); nelayan.

Sumber nafkah utama mayoritas penduduk bekerja sebagai petani karet, dan lainnya sebagai nelayan.

Petani karet terdiri dari pemilik lahan dan buruh tani (= petani penggarap). Sistem bagi hasilnya 1: 2 , pemilik = 1; penggarap = 2.

Persoalan yang dihadapi para petani adalah harga jual yang fluktuatif, saat ini berkisar Rp.5.000 (FGD: “rendah”). Persoalan lain: 2. Produktivitas rendah (RPJM Des 2010-2015). Penghasilan rata-rata Rp.50.000 / hari. Hari kerja = 20 / bulan, penghasilan = Rp.1.000.000). Pemilik: plus lahan lain.

Buruh perkebunan kelapa sawit. Sistem: harian kerja (HK), Rp.50.000/hari, dg target tt) max Rp.100 rb.

Nelayan, menangkap ikan di sungai. Penghasilan, k/l 3 kg harga jual Rp.8.000 / kg = Rp. 24.000.

Tani tanpa lahan: 400-an KK (50 %) dari 970 KK.

C. Data demografi

1. Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

Desa seluas 367,18 Km² dan merupakan daerah aliran sungai di wilayah kecamatan Sepaku ini, pada tahun 2014 berpenduduk sebanyak 1.302 jiwa (448 KK), yang terdiri dari 687 laki-laki dan 615 perempuan.

Dari jumlah dimaksud, apabila dibagi ke dalam 4 kelompok usia maka didapatkan gambaran sebagai berikut:

Usia penduduk menurut kategori Pada tahun 2014

No	Kategori usia	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Balita (0-5 tahun)	85	81
2	Usia sekolah (6-18 tahun)	165	171
3	Usia produktif (19-59 tahun)	401	348
4	Usia lanjut (60 tahun ke atas)	36	15
Jumlah		687	615

Sumber: Monografi desa Pemaluan 2014.

Kategori penduduk menurut pendidikan:

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	22 orang	24 orang
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	18 orang	12 orang
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	30 orang	26 orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	170 orang	129 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	24 orang	19 orang
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	22 orang	37 orang
Tamat SD/ sederajat	250 orang	184 orang
Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	13 orang	4 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	4 orang	2 orang
Tamat SMP/ sederajat	31 orang	77 orang
Tamat SMA/ sederajat	55 orang	31 orang
Tamat D-1/ sederajat	0 orang	0 orang
Tamat D-2/ sederajat	0 orang	0 orang
Tamat D-3/ sederajat	5 orang	9 orang
Tamat S-1/ sederajat	5 orang	7 orang
Tamat S-2/ sederajat	0 orang	0 orang
Tamat S-3/ sederajat	0 orang	0 orang

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Tamat SLB A	0 orang	0 orang
Tamat SLB B	0 orang	0 orang
Tamat SLB C	0 orang	0 orang
Jumlah Total	1.210	orang

Sumber: Monografi desa Pemaluan 2014.

2. Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk akhir tahun, jumlah Penduduk Kecamatan Poncokusumo pada tahun 2013 tercatat sebesar 93.427 jiwa dengan tingkat kepadatan 930 orang/km. (Kecamatan Poncokusumo Dalam Angka Tahun 2013).

Dari jumlah tersebut penduduk Desa Pandansari dihuni 2.410 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 7.548 Jiwa dengan rincian Laki-laki 3.662 Jiwa dan Perempuan 3.886 Jiwa, dengan jumlah warga miskin 1.181 KK. Dari jumlah penduduk tersebut 35,20 persen atau 848 KK adalah petani dengan rincian: petani apel: 537 KK, petani tebu 153 KK dan lain-lain 358 KK sisanya buruh tani 1,042 KK dan pedagang 135 KK (Monografi Desa Pandansari tahun 2014).

Dari hasil SP 2010 dapat diketahui bahwa, struktur umur penduduk cenderung mengarah pada kelompok berusia muda, ini ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan penduduk muda (0-14 tahun) sebesar 35,87 persen. Dengan demikian angka beban ketergantungan secara keseluruhan mencapai 47,37 persen atau dengan angka absolut dikatakan bahwa setiap seratus penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 47 orang bukan usia produktif (0 - 14 tahun) dan 64 tahun ke atas) atau dengan ratio hampir mencapai 2: 1. Bila dilihat dari angka ketergantungan ini sudah baik, namun realita secara ekonomis

di lapangan sangat bergantung pada sumber daya manusia penduduk usia produktif, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa tenaga kerja tidaklah mungkin program pembangunan dilaksanakan. Dari data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Poncokusumo berpenghasilan utama di bidang pertanian. Mengacu data kantor Kecamatan Poncokusumo tercatat sekitar 27.878 rumah tangga bergantungkan dirinya pada sektor pertanian (tani, buruh tani, peternakan, perikanan). Dari jumlah tersebut di Desa Pandansari sendiri mencapai 191 buruh terdiri dari Buruh petani Apel 36 orang, peternakan 95 orang dan perdagangan 48 orang (Poncokusumo Dalam Angka 2014. Hal 29).

Pelayanan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan

Sebenarnya masyarakat yang mendiami Kawasan Desa Pandansari sudah memiliki akses yang relatif cukup bagus terhadap fasilitas sosial dan ekonomi walaupun fasilitas tersebut bukan di wilayah desa Pandansari, namun fasilitas tersebut keberadaannya masih berada di dalam wilayah lain desa atau tetangga desa lainnya yang masih berada di wilayah Kecamatan Poncokusumo. Untuk bidang pendidikan, misalnya masyarakat sudah bisa menggunakan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Pertama, walaupun kenyataannya untuk menyekolahkan anaknya ke SLTA harus pergi ke desa tetangga bahkan kecamatan lain, untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Dalam bidang kesehatan masyarakat juga sudah menggunakan Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Poliklinik sebagai tempat berobat. Puskesmas tersebut dilayani oleh dokter, perawat dan bidan. Sedangkan dalam bidang kerohanian/keagamaan masyarakat juga sudah menggunakan masjid yang ada di wilayah desa lokasi kajian sebagai tempat

beribadat. Masyarakat di dalam kawasan desa juga sudah menggunakan pasar-pasar tradisional yang dekat dengan tempat pemukiman mereka sebagai tempat transaksi, baik untuk hasil-hasil pertanian maupun untuk membeli kebutuhan bahan pokok sehari-hari, meski harus dengan menempuh jarak yang cukup jauh.

Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai suatu cara yang efektif untuk meningkatkan pembangunan, karena itulah negara-negara berkembang mencurahkan perhatian yang cukup besar terhadap perluasan pendidikan.

Adapun tingkat pendidikan penduduk pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Tidak sekolah : 762 Orang
- Lulus SD : 3,752 Orang
- Lulus SLTP : 676 Orang
- Lulus SLTA : 152 Orang
- Sarjana : 51 Orang

Demikian juga pada beberapa kesempatan kerja sebagai kebutuhan hidup, mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu untuk aktivitasnya. Dengan taraf pendidikan tertentu seseorang dapat memenuhi/menimbulkan rasa harga dirinya. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuannya. Oleh karenanya dewasa ini masyarakat sudah menganggap pendidikan sebagai suatu kebutuhan dan pendidikan sudah menjadi simbol status sosial dan merupakan sarana yang diharapkan mampu menyelesaikan banyak permasalahan.

Sejalan dengan permasalahan tersebut maka peningkatan partisipasi sekolah penduduk harus diimbangi dengan

peningkatan sarana fisik pendidikan dan tenaga guru yang memadai. Gambaran nyata mengenai jumlah sekolah, murid dan guru pada tahun 2013 untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah dapat dilihat pada Tabel.

Sejalan dengan permasalahan tersebut di Desa Pandansari baru ada Taman Kanak-kanak (2 swasta dan 2 Negeri), sedangkan untuk pendidikan sekolah dasar juga ada 2 SD Negeri dan 2 SD swasta, sedangkan untuk sekolah lanjutan baru ada satu SLTP swasta. Dengan demikian jika warga Pandansari anaknya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi harus pergi ke Desa lain dalam satu wilayah kecamatan itupun di Kecamatan Poncokusumo belum ada SLTA Negeri atau ke kecamatan lain yang terdekat. Hal ini menggambarkan beban sekolah untuk memberikan pendidikan dasar di Desa Pandansari cukup berat, walaupun menunjukkan perkembangan minat masyarakat dibidang pendidikan untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang sekolah yang lebih tinggi semakin meningkat.

Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan yang berlangsung, bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus diimbangi dengan penyediaan sarana kesehatan sebagai tempat rujukan bilamana masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Sarana kesehatan tersebut berupa penyediaan sarana Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu dan lain-lain. Kemudian sebagai penunjang adalah pengadaan tenaga kesehatan.

Dari beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Desa Pandansari proporsi terbesar adalah Posyandu. Hampir semua RW atau paling tidak dusun di Kecamatan Poncokusumo

mempunyai Posyandu yang diharapkan aktif melakukan kegiatan terutama penanganan/ pemantauan kesehatan ibu dan balita.

3. Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah penduduk Desa Borisallo meliputi sebanyak 3.004 jiwa dengan sebanyak 694 kepala keluarga (KK). Menurut jenis kelamin, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.472 jiwa dan perempuan sebanyak 1.532 jiwa. Rasio laki-laki: perempuan sebesar 96. Pertumbuhan penduduk desa ini relative rendah, yaitu 0,32 persen per tahun. Pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan penduduk di tingkat kecamatan yaitu 0,71 persen, maupun kabupaten, provinsi dan nasional (Kecamatan Parangloe Dalam Angka, 2014). Seperti data wilayah, data kependudukan Desa Borisallo juga tidak ditemukan yang terkini. Data yang diperoleh dari Pemerintah Desa adalah data lama dalam Monografi Desa tahun 2006.

Berdasarkan Monografi tersebut diketahui penduduk Borisallo menurut kelompok seperti dalam tabel di bawah. Data tersebut sekurangnya member gambaran walau pun bukan merupakan kondisi terkini.

Tabel Penduduk Desa Borisallo Menurut Kelompok

NO	KELOMPOK USIA	JUMLAH (jiwa)
1	BALITA 0 - 5 TAHUN	173
2	PRA SEKOLAH 4-6 TAHUN	143
3	SEKOLAH 7 - 18 TAHUN	581
	TOTAL ANAK	804
4	DEWASA 19 - 58 TAHUN	1818
5	DI ATAS 59 TAHUN	80
	TOTAL PENDUDUK	2702

Sumber: Monografi Desa Borisallo, 2006 (diolah)

4. Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Jumlah penduduk desa Nyogan sebanyak 3.355 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.737, perempuan 1.618. Adapun jumlah kepala keluarga (KK) ada 957 KK (Monografi Desa Nyogan, 2015). Jumlah penduduk Nyogan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tingkat kelahiran lebih besar dari kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar. Persebaran penduduk di desa Nyogan berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing RT berbeda maka tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2010. Rt 01, Rt 03, Rt 06 dan RT 08 merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi, yaitu 150 jiwa per Km². Sementara itu di Rt.11, Rt.13 dan Rt. 14 merupakan tingkat kepadatan terendah yaitu dengan tingkat kepadatan 80 jiwa per km².

NO	PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Karyawan	40
2	wiraswasta	222
3	Tani	760
4	Buruh tani	453
5	Pertukangan	25
6	Nelayan	400
7	Jasa	72
JUMLAH		

NO	KELOMPOK USIA	JUMLAH (JIWA)
1	PRA SEKOLAH 4 -6 TAHUN	227
2	USIA SEKOLAH DASAR 7 - 12 THN	375
3	USIA SLTP 13 - 15 TAHUN	172
TOTAL ANAK		
4	DEWASA 20 - 26 TAHUN	639
5	DI ATAS 27 - 40 TAHUN	554
TOTAL PENDUDUK		

D. Data kondisi sosial budaya

1. Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

Warga masyarakat di wilayah ini bersifat heterogin, dengan komposisi terbesar dari suku Jawa, suku Bugis dan suku Banjar, serta anggota masyarakat pendatang dari daerah lain. Namun demikian, dari heterogenitas itu, hubungan antar warga relatif nyaman dan damai. Masing-masing pihak dapat menghargai pihak lain dan terjalin hubungan yang erat.

Tokoh adat setempat (Banjar) masih mendapatkan tempat yang tinggi di masyarakat. Dalam berbagai fora, pimpinan adat ditempatkan di posisi yang sejajar dengan tokoh pemerintahan setempat. Tokoh adat ini juga selalu diajak berembug ketika ada program dan kegiatan yang akan dilakukan di tingkat desa.

Demikian pula pada saat salah satu pihak mengadakan penampilan dari seni budaya, masing-masing suku terlihat antusias dan memberikan apresiasi atas pertunjukan dimaksud.

2. Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

Desa Pandansari telah mengikuti struktur pemerintahan yang ada dengan struktur pemerintahan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris/Carik Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun/Lingkungan dan Ketua RW/RT.

Secara administrasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, sedangkan untuk tugas lainnya yang berhubungan dengan masyarakat, pembangunan, keamanan dan ketertiban diserahkan kepada para kepala urusan dan kepala dusun/lingkungan. Sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.5 tahun 1974, disebutkan bahwa Kepala Desa menjalankan hak, wewenang

dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Selain Permendagri No.5 tahun 1974, juga menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud desa atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan diri, dengan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dalam Undang Undang tersebut diakui adanya otonomi yang dimiliki Desa. Artinya desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya itu sendiri. Dengan demikian desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam menyelenggarakan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Dengan pemikiran semacam itu maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan empowering. Dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektifitas, efisiensi dan optimalisasi otonomi daerah.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu memperkuat desa

merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi desa pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya. Kemandirian fungsi desa dalam konteks otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karenanya peningkatan fungsi dan kelembagaan desa memiliki arti yang strategis.

Selain para aparat desa seperti tercantum di atas, di masyarakat ada juga pimpinan yang diakui warga, yakni kepala Lingkungan, ketua RW/RT. Tugas ketua RT/RW dan kepala lingkungan adalah sama, yakni memimpin menjaga ketertiban dan keamanan, menyelesaikan masalah yang timbul di lingkungan. Proses penyelesaian masalah pada awalnya diselesaikan secara adat. Akan tetapi apabila permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara adat, keberadaan aparat pemerintahan termasuk kepala desa tetap diperlukan yang pada akhirnya juga dilibatkan untuk menyelesaikan masalah yang tidak mampu diselesaikan melalui adat.

3. Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Desa Borisallo memiliki akar sejarah cukup panjang. Sebelum menjadi desa seperti saat ini, Borisallo merupakan kerajaan, yang dipimpin oleh seorang raja atau pemangku adat. Desa ini merupakan pusat kerajaan Gowa tempo dulu. Nama Borisallo sendiri berarti kampung lama, bori (dalam bahasa setempat) berarti “desa”, sedangkan sallo berarti “lama”. Sampai saat ini keturunan raja Gowa masih menetap di desa ini dan dihormati oleh warga setempat sebagai tokoh adat. Raja terakhir: Magguliling Karaeng Gassing (1963).

Penduduk desa ini bisa dikatakan seluruhnya beretnis Makassar dan seluruhnya menganut agama Islam. Masyarakat

Desa Borisallo memiliki tradisi saling tolong menolong di antara sesamanya, yang disebut “*akio*”. *Akio* adalah bahasa setempat yang memiliki arti memanggil, tanpa diundang dalam situasi tertentu seperti kematian seorang warga misalnya, maka tanpa diundang warga lain akan datang untuk menolong. Kebiasaan yang sama juga dilakukan dalam pekerjaan berat yang memerlukan tenaga, seperti menanam padi. Akan tetapi beberapa waktu belakangan tradisi ini semakin menurun. Borisallo sebagai desa telah dimekarkan sebanyak dua kali. Pemekaran pertama tahun 1989 menghasilkan Desa Belapungranga, dan pemekaran kedua tahun 2006, menghasilkan desa Bontokassi.

Satu kearifan lokal yang dapat dinilai sebagai suatu bentuk kemandirian masyarakat desa Borisallo adalah Sinoman. Sinoman merupakan perkumpulan kematian yang murni dibentuk dan dipelihara masyarakat untuk kebutuhan acara pemakaman. Pengurus Sinoman mengatakan 99 persen keluarga bergabung sebagai anggota Sinoman. Kegiatan Sinoman adalah membantu keluarga yang mengalami kemalangan dalam seluruh proses pemakaman anggota keluarga yang meninggal. Bantuan berupa tenaga, pengadaan fasilitas tenda, kursi, penggalan makam dan kain kafan. Biaya ditarik dari setiap anggota sebesar Rp.5.000 per kejadian. Dalam diskusi pengurus menyampaikan niat untuk mengembangkan lembaganya dengan merubah system iuran dari per kejadian menjadi iuran bulanan.

4. Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan,

mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Nyogan relatif cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya, hal ini terlihat cukup banyak warga yang menempuh jenjang pendidikan SLTA.

Pendidikan merupakan salah faktor penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian/pendapatan pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan tinggi dan berkualitas maka cenderung akan mengangkat tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan munculnya lapangan pekerjaan baru cenderung akan membantu program pemerintah untuk lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan juga cenderung dapat mempertajam pola pikir seseorang, selain lebih mudah menerima informasi yang lebih luas.

Wanita dan anak merupakan hal yang cukup penting dalam pelaksanaan pembangunan dan turut menentukan keberhasilan pembangunan di Nyogan. Pada tahun 2010 diketahui bahwa jumlah penduduk wanita mencapai 1249 atau sekitar 45 persen dari total penduduk yang berjumlah 3002 jiwa. Dalam hal pemberdayaan terhadap wanita peran kelompok PKK cukup aktif dalam beberapa kegiatan tersebut, diantaranya penyuluhan terhadap ibu-ibu perihal gizi anak, arisan diantar anggota PKK. Dalam kegiatan arisan merupakan forum saling tukar informasi bagaimana program PKK yang perlu diadakan sehubungan dengan persoalan yang dihadapi keluarga.

Dalam kaitan dengan kualitas SDM menarik apa yang diungkapkan Ali Khomsan (2015), bahwa investasi orang tua terhadap anak adalah segala usaha .

Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Nyogan mayoritas (99 persen) beragama Islam. Dalam kehidupan beragama boleh dikatakan kesadaran untuk melaksanakan ibadah keagamaan cukup berkembang dengan baik. Hal ini ditunjang oleh sarana ibadah yang cukup memadai, yaitu dengan adanya masjid sebanyak 4 unit dan alam kondisi baik serta ada mushola/surau atau langgar sebanyak tujuh unit dalam keadaan cukup baik. Di Nyogan terdapat juga Majelis Taklim, dalam majlis merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas beribadah/iman. Dengan tekun beribadah cenderung memiliki rasa saling tolong menolong di antara mereka. Dan di desa Nyogan terdapat juga tiga TPA, dengan adanya TPA memiliki peran dalam pembinaan spiritual anak, ada dibiasakan berbuat baik dan patuh pada ajaran agama, dengan ajaran agama tersebut anak cenderung berperilaku baik dan lebih awal diperkenalkan etika berdsarkan usianya. Berdasarkan informasi warga Majelis taklim di Nyogan ada 15 kelompok dengan anggota sebesar 500 anggota. Adapun Remaja Masjid ada 4 kelompok.

E. Data Kesehatan

1. Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

Terhitung sejak tanggal 30 April 2014 jumlah puskesmas yang ada di Kecamatan Sepaku sebanyak 4 buah. Sedangkan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling sebanyak 11 buah. Dan jumlah polindes yang ada di Kecamatan Sepaku sebanyak 10 buah sedangkan posyandu yang aktif sebanyak 68 kelompok. Selain sarana kesehatan yang tersedia, tenaga kesehatan yang merata di seluruh wilayah pun harus terpenuhi. Jumlah tenaga medis yang tersedia di Kecamatan Sepaku pada tanggal 30 April 2014 untuk tenaga dokter sebanyak 8 orang, perawat 44 orang. Sedangkan untuk tenaga penolong

persalinan bidan sebanyak 25 orang yang menyebar cukup merata di seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku dan penolong persalinan tradisional atau dukun bayi sebanyak 31 orang.

Khusus untuk kelurahan Pemaluan, sarana kesehatan ini terdapat 1 Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

2. Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

Pembangunan sektor kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan yang berlangsung, bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus diimbangi dengan penyediaan sarana kesehatan sebagai tempat rujukan bilamana masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Sarana kesehatan tersebut berupa penyediaan sarana Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu dan lain-lain. Kemudian sebagai penunjang adalah pengadaan tenaga kesehatan.

Dari beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Desa Pandansari proporsi terbesar adalah Posyandu. Hampir di semua RW atau paling tidak dusun di Kecamatan Poncokusumo mempunyai Posyandu yang diharapkan aktif melakukan kegiatan terutama penanganan/ pemantauan kesehatan ibu dan balita.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di desa lokasi kajian sudah ada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes di Desa Pandansari. Selain itu juga sudah ada poliklinis yang buka 24 jam. Sebagai tempat berobat bagi masyarakat yang bermukim di desa tersebut jika menginginkan

berobat ke Puskesmas adanya di Kecamatan. Poskesdes di Desa Pandansari tersebut saat ini dilayani oleh seorang perawat dan seorang bidan desa.

3. Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam bidang kesehatan di desa ini terdapat: puskesmas pembantu (pustu) (1 buah), posyandu (3 buah).

Selain itu terdapat tenaga bidan desa untuk melayani ibu hamil dan anak. Diperoleh informasi bahwa pada umumnya balita setempat sudah dikontrol pertumbuhannya secara rutin yaitu melalui Posyandu yang tersedia.

4. Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat desa Nyogan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian, dan angka dan status anak bergizi buruk. Berdasarkan RPJM-Des (2010-2015) kondisi kesehatan masyarakat Nyogan tahun 2009 dengan jumlah penduduk 2529 yang dalam kondisi baik berjumlah 2500 dan yang kondisinya kurang baik ada 17 orang. Untuk tahun 2010 dengan jumlah penduduk 3002 jiwa yang kondisi kesehatannya kurang baik ada sekitar 12 orang. Berdasarkan informasi terakhir di desa Nyogan terdapat satu unit Puskesmas yang kondisinya cukup baik, dan masih ada Posyandu dua unit yang kondisinya juga baik.

F. Data Pendidikan

1. Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

Terhitung sejak tanggal 30 April 2014 Kecamatan Sepaku memiliki PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebanyak 13,

TK (Taman Kanak-kanak) sebanyak 15, SD (Sekolah Dasar) sebanyak 28 sekolah, SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 7 sekolah dan SMA (Sekolah Menengah Atas)/MA (Madrasah Aliyah) sebanyak 2 sekolah. Selain memiliki fasilitas pendidikan formal seperti di atas Kecamatan Sepaku juga memiliki fasilitas pendidikan non formal yaitu, 1 Pondok Pesantren dan 14 Madrasah Diniyah.

Dari jumlah dimaksud, lembaga pendidikan yang ada di kelurahan Pemaluan meliputi: PAUD (0), TK (1), SD (1), SMP (0), SMA/SMK(0), PT (0). Dengan demikian, untuk menjangkau layanan pendidikan, warga di kelurahan ini harus mengikutinya di wilayah desa lain. Inilah sebabnya maka tingkat pendidikan di kelurahan ini relatif rendah.

2. Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

Pendidikan dianggap sebagai suatu cara yang efektif untuk meningkatkan pembangunan, karena itulah negara-negara berkembang mencurahkan perhatian yang cukup besar terhadap perluasan pendidikan. Adapun tingkat pendidikan penduduk pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Tidak sekolah : 762 Orang
- Lulus SD : 3,752 Orang
- Lulus SLTP : 676 Orang
- Lulus SLTA : 152 Orang
- Sarjana : 51 Orang

Demikian juga pada beberapa kesempatan kerja sebagai kebutuhan hidup, mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu untuk aktivitasnya. Dengan taraf pendidikan tertentu seseorang dapat memenuhi/menimbulkan rasa harga dirinya. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan

kemampuannya. Oleh karenanya dewasa ini masyarakat sudah menganggap pendidikan sebagai suatu kebutuhan dan pendidikan sudah menjadi simbol status sosial dan merupakan sarana yang diharapkan mampu menyelesaikan banyak permasalahan.

Sejalan dengan permasalahan tersebut maka peningkatan partisipasi sekolah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan sarana fisik pendidikan dan tenaga guru yang memadai. Gambaran nyata mengenai jumlah sekolah, murid dan guru pada tahun 2013 untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

Sejalan dengan permasalahan tersebut di Desa Pandansari baru ada Taman Kanak-kanak (2 swasta dan 2 Negeri), sedangkan untuk pendidikan sekolah dasar juga ada 2 SD Negeri dan 2 SD swasta, sedangkan untuk sekolah lanjutan baru ada satu SLTP swasta. Dengan demikian jika warga Pandansari anaknya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi harus pergi ke Desa lain dalam satu wilayah kecamatan itupun di Kecamatan Poncokusumo belum ada SLTA Negeri atau ke kecamatan lain yang terdekat. Hal ini menggambarkan beban sekolah untuk memberikan pendidikan dasar di Desa Pandansari cukup berat, walaupun menunjukkan perkembangan minat masyarakat dibidang pendidikan untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang sekolah yang lebih tinggi semakin meningkat.

3. Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut pendidikan yang ditamatkan, penduduk Borisallo paling banyak tamat SMP (364 orang), kemudian tamat SD (277 orang), tamat SLTA (141 orang), tamat D1 (21 orang) dan strata 1 dan 2 (39 orang). Selain itu terdapat penduduk tidak tamat SD (15 orang) dan buta huruf (479 orang). Angka-angka ini memperlihatkan bahwa kondisi pendidikan penduduk Borisallo masih rendah (Monografi Desa Borisallo, 2006).

Hal ini sesungguhnya mengandung makna kontradiktif mengingat desa ini relatif dekat dengan pusat kecamatan, kabupaten bahkan dengan kota provinsi. Lebih kontradiktif lagi mengingat desa ini merupakan kampung lama, sekaligus sebagai pusat kerajaan Gowa. Dalam posisi seperti itu semestinya pendidikan cepat masuk di desa ini, akan tetapi realitanya sampai saat ini masih terdapat banyak penduduk yang belum dapat membaca dan menulis atau buta huruf.

Rendahnya pendidikan masyarakat setempat kini kiranya sudah mendapat respon dari pemerintah Kabupaten Gowa. Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) setiap orang anak usia sekolah wajib bersekolah. Apabila terdapat anak usia sekolah tidak bersekolah maka orangtuanya dikenakan denda. Perda ini tampak efektif, peserta diskusi melaporkan sepengetahuan mereka tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

4. Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Penduduk Desa Nyogan Menurut Pendidikan Tahun 2010

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tamat SD	120	130	250
2	Tamat SMP	80	110	190
3	Tamat SMA	70	35	105
4	S1	5	3	8
5	Pelajar SD	286	175	461
6	Pelajar SMP	30	76	106
7	Pelajar SMA	5	15	20
8	Mahasiswa	2	3	5
9	Tidak sekolah/putus sekolah	1.1104	643	1/747
10	Belum sekolah	68	42	110
JUMLAH		1770	1232	3002

Sumber: Revisi RPJM Desa Nyogan 2010-2015 (data tahun 2010)

G. Data Psikografis

1. Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

Secara umum, warga di wilayah ini menghargai kesetaraan hak sebagai sesama warga. Berbagai keputusan warga dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat. Dengan kondisi rukunnya antar warga, musyawarah masih terus dapat dilakukan bersama. Pertemuan antar warga di setiap RT dapat berjalan wajar. Pertemuan rutin bulanan dilaksanakan secara bergilir di rumah warga.

Untuk bahasa sehari-hari yang digunakan warga setempat adalah bahasa Indonesia. Namun demikian, mengingat warga desa ini terdiri dari tiga element besar suku yakni Jawa, Bugis dan Banjar, maka di antara mereka, pada saat ketemu dan berkomunikasi dengan warga “sesuku” mereka menggunakan bahasa ibu. Yang membanggakan, meskipun sedang berkomunikasi dengan bahasa ibu, tidak ada kecurigaan ataupun berfikiran negatif dari suku lain. Pada saat berkomunikasi dengan suku yang lain tetap bisa saling menerima dan menggunakan bahasa Indonesia.

Demikian juga, kehadiran tokoh formal dan adat, masih dihargai dan dihormati. Tokoh formal pemerintahan, sejak jenjang lokal (RT, RW) yang ada hingga pejabat yang lebih tinggi masih dihormati. Tokoh adat, terutama tokoh adat Banjar, sebagai *indigenous citizen*, masih dihormati. Segala mufakat dari musyawarah yang ada, masih memperhatikan nasihat dan pertimbangan para pimpinan adat.

Pagelaran seni dan budaya, baik yang bernuansa Banjar, Jawa maupun Bugis masih sering ditampilkan pada acara-acara ceremonial. Warga masyarakat dapat saling menerima dan menghargai keberadaan seni dan budaya dimaksud.

Di lain pihak, dengan pesatnya teknologi informasi yang ada saat ini, warga masyarakat sudah menggunakan media IT yang modern. Warga masyarakat dapat mengakses informasi dari luar dengan menggunakan gadget dan perangkat elektronik lainnya yang tentu saja memperluas cakrawala informasi ke berbagai belahan bumi dengan mudahnya.

2. Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

Warga masyarakat di desa Pandansari hampir seluruhnya berpenduduk suku Jawa. Dengan demikian komunikasi yang digunakan lebih banyak menggunakan bahasa Jawa. Namun demikian, tentu saja bahasa Indonesia juga digunakan dalam bahasa sehari-hari.

Kehadiran tokoh formal dan tokoh agama masih ditempatkan pada posisi tinggi. Untuk tokoh formal, keberadaan kepengurusan RT, dukuh (kepala dusun), kepala desa dan perangkatnya masih dijunjung tinggi. Demikian juga untuk tokoh agama, para ustadz dan ustadzah sangat didengarkan. Majelis taklim serta perkumpulan pengajian masih diikuti secara wajar.

Untuk kegiatan seni dan budaya, masyarakat di desa Pandansari masih melakukan upaya melestarikan kesenian yang ada seperti rodhatan, samroh serta ludrukan. Kegiatan kesenian ini ditampilkan pada hari-hari raya kenegaraan maupun keagamaan.

Di lain pihak, dengan pesatnya teknologi informasi yang ada saat ini, warga masyarakat sudah menggunakan media IT yang modern. Warga masyarakat dapat mengakses informasi dari luar dengan menggunakan gadget dan perangkat elektronik lainnya yang tentu saja memperluas cakrawala informasi ke berbagai belahan bumi dengan mudahnya.

3. Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Warga masyarakat di desa Borisallo hampir seluruhnya berpenduduk suku Bugis. Dengan demikian komunikasi yang digunakan lebih banyak menggunakan bahasa Bugis. Namun demikian, tentu saja bahasa Indonesia juga digunakan dalam bahasa sehari-hari.

Untuk kegiatan seni dan budaya, masyarakat di desa Borisallo masih melakukan upaya melestarikan kesenian yang ada.

Masyarakat Desa Borisallo memiliki tradisi saling tolong menolong di antara sesamanya, yang disebut "*akio*". *Akio*, istilah dalam bahasa setempat, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "memanggil". Makna yang terkandung dalam tradisi *akio* adalah saling tolong menolong, seseorang secara otomatis akan atau wajib datang membantu orang atau keluarga lain yang sedang memerlukan pertolongan. Misalnya, dalam peristiwa kematian, maka tanpa diundang warga lain akan datang untuk menolong. Kebiasaan yang sama juga dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan berat yang memerlukan tenaga banyak orang, seperti menanam padi. Akan tetapi beberapa waktu belakangan tradisi ini semakin menurun.

Sejumlah tokoh desa yang hadir dalam diskusi tampak memperlihatkan kegigihan untuk memajukan anak-anaknya melalui pendidikan. Walaupun tidak didukung dengan penghasilan yang pasti mereka menyelahkan anak-anaknya hingga lulus perguruan tinggi. Keteladanan ini kiranya penting untuk menjadi contoh bagi warga lain.

4. Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Warga masyarakat di desa Mestong masih menempatkan nilai adat pada posisi yang tinggi. Kehidupan keseharian, dapat dikatakan sangat mengikuti pola adat yang ada. Oleh karenanya, pimpinan suu menempati posisi yang tinggi di masyarakat ini.

H. Data Stakeholder

1. Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

Adanya lembaga pemerintah, lembaga adat serta dunia usaha seperti Perusahaan Perkebunan merupakan pihak-pihak yang telah bersama-sama membangun desa selama ini. Pemerintah telah memberikan berbagai dukungan untuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kegiatan yang masih mengesakan di hati masyarakat setempat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah digulirkan sejak 2007 hingga tahun 2013. Kegiatan PNPM dimaksud meliputi: pengerasan jalan sepanjang 14 km, 1 buah jembatan, pengadaan sumber air bersih sebanyak 10 unit, sarana dan perlengkapan pendidikan sebanyak 1 unit, insentif tenaga pendidik, penyuluhan dan pelatihan pendidikan, serta dukungan untuk kegiatan simpan pinjam bagi kaum perempuan sebanyak 25 unit dengan nilai Rp 843.671.900,-.

Kemudian pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga memberikan dukungan untuk pemberdayaan masyarakat dengan bantuan sosial untuk para petani. Selain itu pemerintah kabupaten juga memfasilitasi jalinan kerjasama dengan perusahaan perkebunan yang ada, dengan melibatkan warga setempat untuk menanam tanaman kelapa sawit sebagai plasma. Pada saat panen, para petani diberikan kesempatan untuk menjual hasil panennya kepada perusahaan dengan harga yang wajar dan standard.

2. Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

Pemerintah kabupaten memberikan 7 program utama yang meliputi: pelayanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan murah yang berkualitas, menyediakan infrastruktur yang memadai, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi dan ketahanan pangan, kemudahan pelayanan public, pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

Sedangkan pemerintah kecamatan Poncokusumo mempunyai 5 program prioritas yang meliputi: (1) bidang kesehatan “bidanku tercinta” (tertib, cerdas, inovatif, tanggap dan akuntabel), (2) bidang pendidikan “sekolah sehat” , (3) bidang pariwisata “Parikesit” (pariwisata dan kesenian tradisional), (4) bidang pertanian “Gerbang Intan” (gerakan membangun industry dan pertanian), dan (5) bidang infrastruktur “insulin” (infrastruktur, sarana umum dan lalu lintas).

3. Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Di desa ini terdapat berbagai pihak yang telah dan dapat dimanfaatkan dalam pemberdayaan seperti: kelembagaan ekonomi (koperasi simpan pinjam), usaha kecil rumah tangga (keripik), kelembagaan pemerintahan (peningkatan kapasitas aparat desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Selain itu ada kesan kuat diantara Kades, BPD dan LPM sudah saling bekerja sama dalam penyusun RPJM-Des, dan kelembagaan sosial (pranata gotong royong, Majelis Taklim, dan nilai-nilai kearifan lokal).

4. Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Meskipun belum didayagunakan secara optimal, di desa ini terdapat berbagai pihak yang telah dan dapat dimanfaatkan dalam pemberdayaan seperti: kelembagaan ekonomi (koperasi simpan pinjam), usaha kecil rumah tangga (keripik), kelembagaan pemerintahan (peningkatan kapasitas aparat desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sungguhpun ada kesan kuat diantara Kades, BPD dan LPM sudah saling bekerja sama dalam penyusun RPJM-Des, dan kelembagaan sosial (pranata gotong royong, Majelis Taklim, dan nilai-nilai kearifan lokal).

I. Pola Komunikasi

1. Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

Pola komunikasi yang ada di wilayah Pemaluan, dapat terjalin secara dialogis antar warga di semua tingkatan. Komunikasi ini berjalan melalui berbagai fora baik yang formal maupun informal. Untuk komunikasi formal, komunikasi antar warga terlaksana melalui forum pertemuan warga yang diadakan rutin setiap bulan. Pertemuan yang diadakan di setiap RT dapat membangun hubungan silaturahmi antar warga. Dalam pertemuan itu setiap warga dapat mengemukakan usul dan saran demi kemaslahatan umat sekitar. Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam fora dimaksud dijalankan bersama oleh warga.

Meskipun di wilayah ini masyarakat yang ada bersifat heterogin, dengan etnis yang berasal dari tempat berbeda (Bugis, Jawa, Banjar adalah mempunyai populasi terbesar), namun kekompakan dan silaturahmi tampak amat baik. Dengan gambaran kondisi seperti ini, maka potensi konflik menjadi relatif kecil.

Pertemuan serupa juga dilaksanakan oleh para ibu. Melalui pertemuan PKK dan Posyandu, ibu-ibu menjalin komunikasi yang baik, sekaligus melaksanakan pelayanan masyarakat melalui penimbangan bayi dan kegiatan lainnya.

Untuk kaum muda, Karang Taruna dan olah raga menjadi media dalam menjalin komunikasi di antara mereka. Di Pemaluan ini, kaum muda tampak rukun bahkan termasuk dalam pengumpulan iuran bulanan bagi organisasi mereka.

2. Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

Kondisi pola komunikasi di desa Pandansari juga dapat terjalin secara dialogis. Pertemuan bulanan pada tiap RT berjalan baik. Di samping itu, adanya majlis taklim dan kegiatan social keagamaan lainnya, sangat mendukung terjalannya tali silaturahmi di antara warga. Meskipun demikian, para ulama dan umaroh tetap ditempatkan pada posisi terhormat.

Pertemuan formal di tingkat desa dan RT berjalan lancar. Setiap bulan, diadakan pertemuan rutin yang tempatnya berpindah-pindah pada rumah warga secara bergantian.

Organisasi ibu-ibu PKK berjalan baik dan mengadakan pertemuan rutin melalui pengajia, PKK dan Posyandu. Bahkan terdapat sekelompok ibu yang mengadakan usaha bersama dalam membuat keripik dari papaya, singkong dan ubi yang sudah mampu menembus pasar di luar desa.

Demikian juga organisasi para bapak yang tergabung dalam kelompok tani dan KUBE. Dalam organisasi ini komunikasi terjadi secara dialogis.

3. Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Pertemuan formal di tingkat desa dan RT berjalan lancar. Setiap bulan, diadakan pertemuan rutin yang tempatnya

berpindah-pindah pada rumah warga secara bergantian. Gotong royong dapat berjalan secara wajar.

4. Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Suasana nilai adat tetap kental di wilayah ini. Namun demikian suasana kekeluargaan pada masyarakat tampak amat kental. Pola komunikasi antar warga dapat berjalan secara dialogis, dengan tetap menempatkan pimpinan adat serta pimpinan desa formal pada posisi yang terhormat.

BAB III

HASIL DISKUSI PARA SATUAN KERJA DI DAERAH SAMPEL

Dari diskusi yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, tokoh masyarakat dan anggota DPRD, diperoleh berbagai informasi yang secara umum sangat mendukung atas diluncurkannya program Desa Sejahtera Mandiri. Para pemangku kepentingan bahkan menyatakan bahwa lembaganya bersedia mendukung program ini, dengan merancang dan mengalokasikan anggaran untuk terlaksananya kegiatan ini. Para pemangku kepentingan melihat bahwa program ini akan membuka peluang terjadinya peningkatan kualitas kehidupan warga desa yang menjadi sasaran program. Selain itu, diisyaratkan bahwa untuk membangun desa menuju desa sejahtera mandiri diperlukan adanya sinergitas dari berbagai pihak pemangku kepentingan secara terpadu.

Berikut butir-butir yang terangkum dari hasil diskusi di wilayah sampel:

1. Informasi yang terkumpul melalui FGD pada setiap wilayah sampel, terkumpul usulan, harapan dan saran tentang bagaimana niat membangun desa ke depan. Para peserta FGD melontarkan gagasan untuk membangun wilayah. Di lain pihak, masih terjadi semacam lontaran harapan agar pihak pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan bantuan kemudahan untuk pemberdayaan masyarakat. Demikian juga usulan untuk perbaikan tingkat social ekonomi warga. Para peserta FGD menginginkan adanya bantuan bagi warga yang memiliki rumah yang tidak layak huni, pembenahan sarana lingkungan sejak pengerasan jalan sampai saluran air minum, hingga pemberdayaan ekonomi produktif.

2. Sinergisme

Dengan berorientasi pada lokasi yang sudah ditetapkan pada MoU Kementerian Sosial dengan 14 Perguruan Tinggi (100 desa), maka setiap Satuan Kerja bertekad untuk mengarahkan target lokasi pada setiap kegiatannya pada lokasi-lokasi dimaksud. Bappeda dalam fungsinya sebagai koordinasi perencanaan pembangunan, akan mendukung tiap satker dengan mendukung alokasi anggaran selama tidak bertentangan dengan hasil rapat koordinasi sebelumnya.

Selain itu, hasil diskusi ini akan dibawa pada raker di tiap kabupaten sampel demi tersusunnya perencanaan program di tahun anggaran 2016.

3. Produk unggulan di masing-masing lokasi

Tiap daerah akan mendorong terciptanya produk unggulan daerah. Untuk wilayah Pemaluan, yang telah merintis plasma perkebunan mengharap adanya bimbingan yang lebih intensif. Demikian pula untuk usaha tanaman karet yang telah berjalan selama dua tahun, mengharap bimbingan pengelolaan tanaman karet dan menyadap serta memasarkannya.

Khusus untuk ibu-ibu yang merintis usaha anyaman lidi dan rotan untuk menghasilkan produk kerajinan berbentuk piring dan alat rumah tangga lainnya, mengharap dukungan pemasaran. Memang beberapa produk dari anyaman ini pernah sampai terpasarkan di luar daerah, namun karena asset permodalan dan keterbatasan akses pemasaran, maka produk ini seperti lambat jalannya.

Untuk desa Pandansari, dengan kebijakan pemerintah kecamatan untuk mendukung desa agrowisata, maka warga telah mengusahakan produk yang berorientasi pada kebijakan dimaksud. Pengolahan buah apel menjadi sari buah, penanaman bunga krisant dan produk kerajinan menjadi pilihan usaha warga saat ini.

Untuk desa Borisallo, usaha pertanian dan peternakan menjadi prioritas. Maka warga mengharapkan adanya dukungan kemudahan dalam mendapatkan benih hingga pemasaran.

Demikian juga untuk desa Mestong, didapatkan informasi bahwa melalui musyawarah rencana desa, warga bertekad untuk memajukan usaha pertanian dan peternakan.

4. Untuk potensi pasar pada masing-masing lokasi

Sebagai wilayah yang berada pada posisi yang berdekatan dengan beberapa pabrik pengolahan produksi perkebunan seperti sawit dan kayu, maka Pemaluan memiliki peluang pasar yang besar untuk memasarkan hasil kerajinan dan produk pertaniannya. Dengan banyaknya kaum migrant yang datang dari berbagai wilayah di luar Kalimantan, maka mereka menjadi pasar yang bagus bagi produk pertanian setempat. Demikian pula untuk produk peternakan, sangat memiliki pangsa pasar.

Demikian pula untuk Pandansari, dengan ditetapkannya wilayah kecamatan sebagai daerah penyangga wisata gunung Bromo, maka niscaya desa ini mempunyai potensi pasar yang amat tinggi. Desa ini mempunyai jenis usaha ekonomi kreatif seperti keripik papaya, kemasan bunga, hiasan dari kayu, juga memiliki pasar yang bagus bagi wisatawan yang mengunjungi Bromo. Selain itu, desa ini juga mengembangkan budi daya bunga yang memiliki pasar hingga luar Jawa. Desa ini juga memiliki lahan kebun apel yang cukup luas, yang pemasarannya sampai Batu dan Malang. Bahkan istilah apel Malang atau apel Batu yang selama ini populer bagi wisatawan, ternyata sebagian besar adalah apel yang dihasilkan dari wilayah ini.

Untuk Borisallo, desa ini terletak di lokasi yang tidak jauh dari ibu kota kabupaten dan bahkan dari ibu kota provinsi. Universitas Muslim Makassar sebagai pendamping desa menuju desa sejahtera mandiri, telah menjalin relasi dengan berbagai pihak yang memungkinkan untuk mendukung produktivitas dan pemasaran dari hasil desa setempat. Dengan demikian, desa ini memiliki potensi pasar yang besar atas produk unggulannya.

Demikian juga untuk desa Mestong, universitas Jambi telah menjalin kepada berbagai pihak untuk memperluas kerjasama dan dukungan bagi peningkatan produk dan memperluas pemasaran bagi produk setempat.

BAB IV

PEMBAHASAN

Secara konseptual, Desa Sejahtera Mandiri dimengerti sebagai desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Selain itu di desa itu memenuhi kriteria sebagai desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya. Lebih jauh lagi, desa mandiri adalah desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.

Dalam Kerangka Kerja Uji Coba Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, pengertian Desa Sejahtera Mandiri atau Masyarakat Sejahtera Mandiri adalah desa yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, lembaga sosial yang aktif, tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat tinggi dan masyarakat miskin terlibat aktif dalam rantai produksi.

Desa Sejahtera Mandiri adalah desa yang masyarakatnya memiliki indikator kemauan dan kemampuan memanfaatkan secara kreatif dan inovatif seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki

untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas perdesaan. Melalui Desa Sejahtera Mandiri, maka akan tersedia lapangan kerja yang menyerap usia produktif, meningkat kualitas sumberdaya manusia masyarakat desa, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat desa, digunakan SDA dan SDM dari desa sendiri, meningkat derajat kesehatan masyarakat desa, menguat ikatan sosial masyarakat desa serta ada kelembagaan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Dari gambaran pengertian di atas, maka diperlukan adanya kesamaan pengertian bahwa untuk mencapai terwujudnya desa sejahtera mandiri itu perlu dikembangkan beberapa hal seperti berikut:

- Sarana dan prasarana yang memadai (pendidikan, perkantoran, kesehatan, tempat ibadah, akses jalan dan komunikasi)
- Peningkatan sumber daya alam berkelanjutan
- Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- Kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri
- Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- Punya sumber pendapatan sendiri
- Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- Peningkatan ketrampilan, kemandirian dan pemberdayaan
- Terbuka dengan pemerintah
- Adanya aturan-aturan desa
- Harus bisa membiayai aparat desa

Tentu saja untuk pengembangan itu perlu memerhatikan faktor-faktor seperti berikut:

1. Potensi Daya Manusia:

- Masyarakat desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi
- Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat
- Mempunyai kemampuan dan ketrampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal

2. Potensi Sumber Daya Alam

- Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan
- Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra)
- Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat

3. Pasar:

- Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar
- Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar

4. Kelembagaan dan budaya lokal

- Pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Selain itu, perlu memerhatikan:

- Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional
- Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (intenal) maupun sumber dana dari luar (eksternal)
- Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional
- Kurangnya jejaring, informasi dan teknologi pada masyarakat pedesaan.

Untuk mencapai sasaran desa sejahtera mandiri, kiranya bukan hal yang mudah. Diperlukan strategi yang didukung peraturan perundangan, kebijakan, perencanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan. Strategi itu masih memerlukan adanya sinergisme dari berbagai pihak serta perangkat yang ada. Tanpa itu, dikawatirkan nanti desa sejahtera mandiri itu hanya akan menjadi slogan semata.

Salah satu langkah dari strategi ini adalah yang oleh tim peneliti saat ini menyebut “*Spatial planning*”. Dalam *spatial planning*, setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*), perlu mengarahkan kegiatannya pada target (sasaran) lokasi yang sama. Untuk tingkat Pemerintah, kiranya sinergitas seperti pernah dirintis seperti Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) perlu dikembangkan sedemikian rupa. Barangkali, seperti pada periode sekarang ini, seluruh kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian agar tetap mengacu pada visi dan misi Kabinet Kerja, dimaksudkan untuk mencapai keterpaduan langkah agar sasaran yang akan dijangkau oleh setiap pihak, mengarah kepada sasaran yang padu. Demikian pula, untuk setiap Satuan Kerja Pemerintah daerah, juga diarahkan untuk menuju kepada kesatuan konsentrasi dalam penanggulangan masalah yang ada.

Tekad untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan secara sinergis ini perlu didukung oleh semua pihak, baik oleh pelaksana maupun oleh pihak yang dikenai perlakuan. Baik dari unsur *academician*, *business* serta *government* (ABG) perlu bersatu padu dalam meraih capaian yang optimal. Tentu saja upaya itu, tidak lagi “*top down*” seperti sebelumnya, tetapi sudah menggunakan “*bottom up*” *planning*. Masyarakat sebagai sasaran perlu dilibatkan sedemikian rupa.

Kementerian Sosial dengan menandatangani MoU dengan 14 universitas dalam menjangkau serta menyelenggarakan

kegiatan menuju desa sejahtera mandiri adalah salah satu langkah sinergisme ini. Dengan tambahan kontribusi dari pihak dunia usaha, niscaya operasional kegiatan desa sejahtera mandiri akan semakin menuju pada titik optimal.

Pihak universitas memberikan bimbingan kepada desa sasaran tentang bagaimana melakukan *need assesment* dan *potencies assesment*, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kerangka pengembangan desa sejahtera mandiri oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, masyarakat dibimbing untuk menyusun proposal kepada berbagai pihak yang akan/diharapkan terlibat, maka niscaya upaya yang dilaksanakan akan makin optimal.

Untuk saat ini, dari pihak Kementerian Sosial telah memberi peluang kepada desa (100 desa sasaran desa sejahtera mandiri) untuk mengajukan proposal dalam langkah awal menuju desa sejahtera mandiri. Kementerian Sosial memberikan peluang bagi desa sasaran untuk mengajukan proposal bagi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (lebih dikenal dengan Rutilahu) melalui sentuhan Aladin (atap, lantai dan dinding). Selain itu juga kegiatan rehabilitasi sarana lingkungan (sarling). Kemudian selanjutnya pada sasaran desa dimaksud, masih dimungkinkan untuk mengajukan usulan untuk mendapatkan stimulasi dalam program pemberdayaan sosial melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Perlu dipahami bersama bahwa yang lebih tepat adalah “desa membangun” bukan “membangun desa”. Desa membangun dalam hal ini maksudnya: desa dipandang sebagai entitas sosial (kolektif) yang memiliki karakter sosiologis, ekonomis, kultural dan ekologis (spesifik). Sementara kalau membangun desa adalah: kebijakan developmentalisme seperti modernisasi desa, revolusi hijau, teknologi pertanian, transfer modal dan teknologi, industrialisasi.

Dalam desa membangun, masyarakat memberikan kontribusi yang utama. Partisipasi masyarakat ini, menurut Pratchett

(Pratchett, Lawrence et al.2009) dapat dikelompokkan dalam besaran yang disebut *CLEAR*, yakni *Can do - have the resources and knowledge to participate*; (Memiliki sumber daya dan pengetahuan untuk berpartisipasi); *Like to - have a sense of attachment that reinforce participation*; (Memiliki perasaan untuk menguatkan partisipasi, peran serta masyarakat); *Enable to - are provided with the opportunity for participation*; (Terdapat kesempatan, kemauan untuk berpartisipasi); *Asked to - are mobilized through public agencies and civic channels*; (Mobilisasi melalui agensi publik dan saluran masyarakat); dan *Responded to - see evidence that their views have been considered*; (Membuktikan bahwa pandangannya, pendapatnya, ide nya bisa dipertimbangkan).

Secara lebih rinci, partisipasi “*can do*” meliputi:

- a. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melaksanakan program pembangunan. Dalam model ini masyarakat secara individu maupun kelompok sanggup atau dapat melaksanakan program pembangunan;
- b. Termasuk keterampilan sumber daya manusia dalam berorganisasi, kerja sama, ikut dalam kegiatan pembangunan.

Sedangkan partisipasi “*like to*”, secara lebih rinci meliputi:

- a. Dipahami latar belakang mengikuti program pembangunan;
- b. Berkesinambungan: keinginan terus mengikuti program pembangunan;
- c. Kalau sudah memiliki Identitas suku, agama, pendidikan dan lain-lain yang beragam tidak menghalangi untuk berpartisipasi dalam program pembangunan.

Adapun untuk partisipasi “*enable to*”, maksudnya bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk hal-hal yang meliputi:

- a. Terbukanya kesempatan terlibat dalam program pembangunan;

- b. Partisipasi yang difasilitasi oleh program pembangunan;
- c. Mengambil peran untuk berpartisipasi atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Kemudian untuk partisipasi “*asked to*”, maksudnya bahwa untuk berpartisipasi itu merupakan wujud dari niatan anggota masyarakat yang datang dari dirinya untuk:

- a. Mengikuti kegiatan program pembangunan atas keinginan sendiri;
- b. Mengikuti kegiatan pembangunan bukan karena dibayar (tidak niat berpartisipasi);
- c. Mengikuti kegiatan program pembangunan bukan karena terpaksa (tidak niat berpartisipasi).

Untuk partisipasi “*responded to*”, meliputi:

- a. Ide /gagasan partisipan ditanggapi dan dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan; dan
- b. Respon wakil terpilih terhadap gagasan partisipan.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 digambarkan bahwa kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar, seperti: (1) antara pembangunan di Pulau Jawa dengan Luar Jawa; (2) antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, serta (3) antara desa dengan kota.

Untuk konteks pertama, ketimpangan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang berada pada titik yang paling ekstrim, hingga muncul dalam bentuk upaya yang sifatnya sparatis; dalam konteks yang ke tiga adalah adanya kesenjangan antara desa dan kota yang disebabkan oleh investasi ekonomi yang berupa infrastruktur dan kelembagaan yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Ini semua mengakibatkan kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, sedangkan wilayah pedesaan relatif tertinggal.

Ketertinggalan wilayah pedesaan selain dikarenakan infrastruktur dan kelembagan yang kurang memadai, juga disebabkan masih rendahnya produktivitas dan kualitas petani, terbatasnya akses terhadap permodalan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat di pedesaan yang mencakup sekitar 60 persen penduduk Indonesia masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang lebih besar dibandingkan perkotaan.

Percepatan desentralisasi dan otonomi daerah menghadapi berbagai kendala antara lain masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan professional, masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri maupun sumber dana dari luar daerah, belum tersusunnya kelembagaan yang efektif, belum terbangunnya system dan regulasi yang jelas dan tegas, kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah antara lain “Panduan Teknis” dikarenakan belum jelasnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berakibat tumpang tindihnya kebijakan pusat daerah, masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah, masih rendahnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, serta meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah otonom baru yang belum sesuai dengan tujuannya.

Untuk menanggulangnya pemerintah sudah saatnya untuk melaksanakan pembangunan desa, bukan hanya sekedar pemerataan pembangunan tapi justru menjadi fokus kegiatan pembangunan nasional yang dampak utamanya adalah menghilangkan ketertinggalan dan meminimalkan kemiskinan masyarakat melalui layanan kemudahan bagi kawasan tersebut serta komunitas yang tinggal di dalamnya agar menjadi mandiri.

Kometmen pemerintah dalam hal ini tampak dengan adanya keseriusan pemerintah melakukan revisi dan pemecahan Undang-undang Nomor 32/2004 menjadi tiga Undang-undang yang terpisah namun tetap terkait, ke tiga Undang-undang tersebut adalah (1) Undang-undang Pemerintah Daerah, (2) Undang-undang Pilkada Langsung dan (3) Undang-undang Desa.

Pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam format rancangan Undang Undang Desa tersebut dibahas mengenai kepentingan kesejahteraan masyarakat desa hal ini tercermin dengan dikurirkannya dana desa yang dimulai tahun ini (2015) walaupun faktanya dalam implementasi masih jauh dari harapan, karena masih banyak desa yang belum bisa mencairkan dana dimaksud.

Pembangunan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan (masyarakat, ekonomi dan lingkungan) diharapkan dapat menyentuh langsung secara komprehensif baik fisik kawasan maupun masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kegiatan dalam proses pembangunan masyarakat diharapkan adanya data dan informasi dari hasil identifikasi di desa yang dapat menggambarkan kondisi/profil potensi dan permasalahan secara rinci, sehingga data tersebut dapat ditampilkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam urutan prioritas yang mengutamakan kawasan yang perlu segera ditangani melalui pendekatan dan batasan daerah pada hirarki Kabupaten.

Dari hasil pemetaan menggambarkan adanya kondisi/profil potensi dan permasalahan secara rinci seperti hasil temuan di

kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara seperti yang telah diuraikan seperti di atas, sepertinya belum menggambarkan kondisi kelurahan, masih pantas disebut desa, sebab secara fakta masih merupakan Tipologi Desa Swadaya, walaupun dalam data BPS Kabupaten Penajam Paser Utara 2014 wilayah Penajam disebut sebagai Kelurahan dan dikatakan memiliki tipologi desa swasembada. Hal ini disebabkan menurut DR. Yoyok dalam makalahnya yang berjudul “Pola Keruangan Desa” pengertian Desa Swasembada atau Desa Maju/Desa Sejahtera Mandiri adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang ada dengan optimal serta mampu berinteraksi dengan masyarakat di desa/daerah lain. Sedangkan di (www.bumigeografi.co.cc/?p=17) desa swasembada memiliki pengertian “suatu desa yang memiliki ciri matapencapaian penduduk bervariasi, sarana dan prasarana sudah baik, rumah dan infratraktur baik. Sedangkan di Pamaluan tidaklah demikian walaupun statusnya sebagai Kelurahan bukan Desa, namun dilihat dari segi matapencapaian penduduk belum bervariasi, sarana dan prasarana sangat minim dan kumuh, begitu juga rumah dan infratraktur yang ada kurang memadai dapat dikatakan sebagai wilayah sebagai kelurahan karena dilihat dari segi wilayah dan penduduk Pamaluan dapat dikatakan bukan wilayah kelurahan yang memiliki tipologi desa swasembada jika kita lihat dari sarana dan prasarana masih minim dan matapencapaian penduduknya masih mengandalkan dari pertanian/ perkebunan (kerja serabutan) dan faktanya dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), sarana jalan dan sarana sosial atau lembaga sosial belum memadai, demikian juga jenis pekerjaan penduduk dan kondisi ekonomi masyarakat belum bisa dikatakan bervariasi dengan rata-rata penghasilan penduduk juga masih rendah, rata-rata penghasilan baru mencapai Rp.1.500.000,-/ bulan. Maka dari itu walaupun memiliki status kelurahan dengan tipologi desa swasembada wilayah ini lebih tepat dikatakan wilayah pedesaan (Lurah Pamaluan, 2015) dalam FGD Di Desa Pamaluan. Agar pembangunan desa berjalan lancar dibutuhkan lembaga-

lembaga yang diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai potensi desa.

Untuk Kabupaten Malang, permasalahan yang ada hampir sama dengan kabupaten Penajam Paser Utara. Ketertinggalan wilayah pedesaan selain dikarenakan infrastruktur dan kelembagaan yang kurang memadai, juga disebabkan masih rendahnya produktivitas dan kualitas petani, terbatasnya akses terhadap permodalan. Seperti di Desa Pandansari keberadaan kelembagaan ekonomi sangat terbatas. Selain itu juga ada lembaga ekonomi yang jalan di tempat, bahkan ada yang tidak bergerak/beroperasi. Hal ini disebabkan akibat kesejahteraan masyarakat di Desa Pandansari sekitar hampir 50 persen penduduk desa sangat rendah. Hal ini tercermin dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang berpendidikan rendah lebih besar dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Dari data yang ada jika dilihat dari pendidikan dan mata pencaharian penduduk dapat dikatakan sangat rendah hal ini dilihat dari data yang ada dengan jumlah penduduk 7.548 Jiwa ternyata sebagian besar 83,69% berpendidikan SD ke bawah bahkan tidak pernah sekolah. Dengan demikian hanya ada sebagian kecil (3,78%) yang berpendidikan SLTA ke atas. Dari jumlah penduduk tersebut 35,20 persen atau 848 KK adalah petani (petani apel 537 KK, petani tebu 153 KK dan lain-lain 358 KK sisanya buruh tani 1,042 KK dan pedagang 135 KK).

Percepatan desentralisasi dan otonomi daerah menghadapi berbagai kendala antara lain masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional, masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri maupun sumber dana dari luar daerah, belum tersusunnya kelembagaan yang efektif, belum terbangunnya system dan regulasi yang jelas dan tegas, kurangnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah antara lain "Panduan Teknis" dikarenakan belum jelasnya

kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berakibat tumpang tindihnya kebijakan pusat daerah, masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah, masih rendahnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, serta meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah otonom baru yang belum sesuai dengan tujuannya.

Untuk menanggulangnya pemerintah sudah saatnya untuk melaksanakan pembangunan desa, bukan hanya sekedar pemerataan pembangunan tapi justru menjadi fokus kegiatan pembangunan nasional yang dampak utamanya adalah menghilangkan ketertinggalan dan meminimalkan kemiskinan masyarakat melalui layanan kemudahan bagi kawasan tersebut serta komunitas yang tinggal di dalamnya. Kometmen pemerintah dalam hal ini tampak dengan adanya keseriusan pemerintah melakukan revisi dan pemecahan Undang-undang Nomor 32/2004 menjadi tiga Undang-undang yang terpisah namun tetap terkait, ke tiga Undang-undang tersebut adalah (1) Undang-undang Pemerintah Daerah, (2) Undang-undang Pilkada Langsung dan (3) Undang-undang Desa.

Dalam format rancangan Undang Undang Desa tersebut dibahas mengenai kepentingan kesejahteraan masyarakat desa hal ini tercermin dengan dikucurkannya dana desa yang dimulai tahun ini (2015) walaupun faktanya dalam implementasi masih jauh dari harapan, karena masih banyak desa yang belum bisa mencairkan dana dimaksud.

Pembangunan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan (masyarakat, ekonomi dan lingkungan) diharapkan dapat menyentuh langsung secara komprehensif baik fisik kawasan maupun masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kegiatan dalam proses pembangunan masyarakat diharapkan adanya data dan informasi dari hasil identifikasi di desa yang dapat menggambarkan kondisi/profil potensi dan permasalahan secara rinci, sehingga

data tersebut dapat ditampilkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam urutan prioritas yang mengutamakan kawasan yang perlu segera ditangani melalui pendekatan dan batasan daerah pada hirarki Kabupaten.

Dari hasil pemetaan menggambarkan adanya kondisi/profil potensi dan permasalahan secara rinci seperti hasil temuan di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang seperti yang telah diuraikan di atas, menggambarkan kondisi desa secara fakta.

Kabupaten Malang merupakan kabupaten lama yang sudah ada semenjak jaman penjajahan, bahkan sebelum penjajah datang ke tanah Jawa. Maka dari itu di Kabupaten Malang sudah melaksanakan segala program bidang pembangunannya yang dilakukan di wilayahnya, salah satu sector yang sudah baik adalah infrastruktur jalan, sedang infrastruktur sosial dan ekonomi yang berupa kelembagaan sosial masih sangat terbatas. Padahal untuk melihat keberhasilan pembangunan yang maksimal semua sector merupakan faktor penentu bagi terwujudnya pembangunan suatu daerah dapat dikatakan berhasil, kenapa bisa demikian. Pembangunan perdesaan dengan pemberdayaan masyarakat yang selalama ini dilakukan pemerintah sebelum otonomi daerah hingga saat ini langkah yang ditempuh minim koordinasi, baik itu antar Kementerian dan lembaga Negara. Contoh pembangunan di Desa Pandansari melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah sebelum adanya reformasi atau era otonomi daerah, program pembangunan tersebut saat ini sudah banyak yang tidak berjalan apalagi sampai membudaya dengan bentuk organisasi (lembaga) yang dipertahankan masyarakat. Seperti program pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE). KUBE adalah merupakan salah satu program kementerian sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu. Namun implementasinya masih dilakukan secara sektoral hanya

oleh Kementerian Sosial saja melalui Dinas Sosial di Pemerintah Daerah, dengan pendamping lapangan TKSK.

Sebenarnya di Desa Pandansari ini sudah ada KUBE yang merintis sari buah Apel sebagai buah produk unggulan kebon andalan di Malang, namun saat ini KUBE tersebut perjalanannya tersendat bahkan dapat dikatakan tidak berjalan (mati suri) dikarenakan kebon Apel milik warga produktivitasnya sudah mulai menurun karena pembinaan dari pemerintah kurang kata Kepala Desa Pandansari. Lain halnya program yang dilakukan Kementerian Pertanian dan Peternakan, masih ada GAPOKAN (Gabungan Kelompok Pertanian) yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian dan Peternakan hingga saat ini masih banyak yang berjalan.

Untuk desa Borisallo, mata pencaharian penduduk Desa Borisallo pada umumnya adalah bertani. Menurut catatan pemerintah Desa setempat, sebanyak 2.204 dari 2383 angkatan kerja bekerja sebagai petani. Penduduk lainnya bekerja sebagai pedagang (72 orang), PNS/Polri (30 orang), karyawan swasta (10 orang) dan jasa seperti supir, tukang jahit dan tukang bangunan (67 orang).

Tanaman yang banyak ditanam penduduk setempat adalah padi, kacang-kacangan. Di samping itu di lahan kering penduduk juga menanam tanaman-taman keras seperti: mangga, rambutan, coklat, durian, nangka dan kayu-kayuan. Petani di Desa ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: petani pemilik lahan dan petani penggarap (petani tanpa lahan). Petani penggarap menggunakan lahan milik warga lain untuk bertani dengan system bagi hasil, biasanya sawah, dimana hasil panen dibagi dua, satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk penggarap, setelah dikurangi biaya produksi. Pemerintah Desa tidak memiliki data komposisi penduduk pemilik lahan dan penduduk tanpa lahan, akan tetapi dalam diskusi terfokus, seluruh peserta sepakat

membuat perkiraan bahwa petani pemilik lahan meliputi 30 persen dan petani penggarap meliputi 70 persen. Kondisi sangat memperhatikan, sebagian terbesar penduduk desa yang hidup dari pertanian ternyata tidak memiliki lahan, sebagai factor produksi. Mata pencaharian lain yang dilakukan penduduk adalah beternak sapi. Akan tetapi, kedua sumber penghidupan ini belum dilakukan cukup optimal.

Tanaman padi misalnya dinilai belum menghasilkan panen optimal. Demikian juga tanaman keras. Kendala yang terungkap - khususnya tanaman padi - adalah:

- a) Keterbatasan sistem pengairan. Sistem bertani sawah dengan irigasi setengah teknis relatif memberi hasil lumayan karena dapat ditanami dengan tiga musim tanam setiap tahun. Sementara sawah yang tidak memiliki irigasi teknis (tadah hujan) hanya bisa ditanami padi dengan satu kali musim tanam setiap tahun.
- b) Kendala lain yang membuat produktivitas sawah rendah adalah sistem tanam atau cara bercocok tanam. Dalam diskusi terungkap bahwa kebanyakan petani menanam dengan sistem "tabur benih langsung" (disingkat tabela). Sistem ini dinilai memberi hasil kurang optimum jika dibanding dengan sistem pemindahan bibit, namun dilakukan oleh banyak petani. Alasan mereka adalah tidak ada tenaga kerja karena masing-masing petani pada saat bersamaan sibuk mengurus usaha taninya sendiri. Alasan kedua adalah kekurangan modal baik untuk tenaga maupun pengadaan pupuk.
- c) Hama. Hama yang dirasakan sangat mengganggu adalah binatang liar seperti babi hutan, monyet dan burung. Lahan pertanian desa ini berbatasan dengan hutan milik Negara, di mana burung, babi hutan dan monyet masih hidup. Ketiga jenis binatang ini selalu datang mengganggu tanaman petani apabila tidak dijaga.

- d) Kendala lain adalah ternak. Di desa ini banyak penduduk memelihara sapi, akan tetapi sapi dibiarkan lepas, sehingga mengganggu tanaman warga lainnya.

Berdasarkan diskusi terungkap bahwa tradisi bertani para petani setempat masih cenderung seadanya. Artinya belum cukup ditekuni dengan mengerahkan upaya optimal. Dikatakan demikian karena kendala yang dihadapi tersebut semestinya bisa dicarikan jalan keluarnya. Menurut peserta babi hutan misalnya bisa diatasi antara lain dengan membuat pagar sekeliling kebun. Terkait sistem pemeliharaan sapi, sesungguhnya pemerintahan desa sudah menerbitkan peraturan desa (perdes) pada tahun 2012, yang intinya mengatur pemeliharaan sapi tidak boleh dilepas, akan tetapi belum dapat ditegakkan secara konsekuen.

Kegiatan ekonomi lain yang menonjol di desa adalah pertambangan golongan C, yaitu pasir dan batu. Kegiatan penggalian dilakukan di sungai Borisallo. Sehari-hari kegiatan penggalian dan pengangkutan material pasir dan batu tampak sibuk. Tambang pasir dan batu di wilayah desa ini sepertinya merupakan sumber utama pemenuhan kebutuhan material untuk pembangunan fisik seperti jalan dan gedung di daerah sekitarnya, terutama kota Makassar dan Somba Opu. Setiap hari tampak truk-truk besar hilir mudik mengangkut material ke arah Kota Makassar. Sejumlah penduduk Desa Borisallo ikut bekerja sebagai buruh dalam usaha tambang ini. Penghasilan yang diterima sebagai buruh di usaha tambang adalah sebesar Rp.60.000 per hari.

Kegiatan ekonomi berikutnya adalah perdagangan khususnya rumah makan. Di desa ini terdapat lima rumah makan, yang berjejer di seputar jembatan, yang tampak selalu ramai disinggahi pengendara kendaraan pribadi yang melintas, untuk makan dan beristirahat sejenak. Letak desa ini berada sekitar pertengahan pada jalan poros sepanjang 100-an km yang menghubungkan Kota Makassar ke kota wisata berhawa sejuk Malino di bagian utara. Perjalanan yang relatif jauh dengan kondisi jalan yang berliku

dan rusak di sejumlah titik dan kepadatan arus lalu lintas kiranya cukup menguras tenaga. Letak Borisallo yang berada di sekitar pertengahan kiranya menjadi salah satu alasan mereka untuk beristirahat dan makan di rumah makan di desa ini.

Peserta diskusi sepakat bahwa kecenderungan yang berkembang terkait mata pencaharian adalah dimana kaum muda enggan bekerja sebagai petani. Pemuda setempat lebih memilih bekerja di daerah lain walaupun pekerjaan di daerah lain adalah juga sebagai buruh, seperti menjadi buruh di perkebunan di Kalimantan atau buruh pabrik di kota di Jawa. Sebagian bahkan memilih bekerja di luar negeri, menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Terungkap bahwa “bekerja” bagi warga masyarakat Borisallo berarti menerima upah dari orang lain. Oleh karena itu, bertani seperti yang umum dilakukan penduduk setempat belum atau tidak termasuk dalam kategori “bekerja”.

Untuk masyarakat desa Nyogan memiliki sumberdaya lokal yang cukup memadai untuk menopang kesejahteraan warganya, diantaranya lahan yang cukup luas dan belum tergarap (lahan tidur) yang cenderung bisa dimanfaatkan untuk perkebunan sawit dan karet berdasarkan kemampuan warga setempat, potensi pakan ternak (sapi dan kambing) Akan tetapi sumberdaya lokal itu belum didayagunakan secara optimal karena ada kecenderungan keterbatasan masyarakat dalam teknologi (bimbingan peningkatan perawatan kebun; teknis pengelolaan panen dan hasil panen serta bibit yang memadai), kelembagaan ekonomi (koperasi simpan pinjam), usaha kecil rumah tangga (keripik), kelembagaan pemerintahan (peningkatan kapasitas aparat desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sungguhpun ada kesan kuat diantara Kades, BPD dan LPM sudah saling bekerja sama dalam penyusunan RPJM-Des, dan kelembagaan sosial (pranata gotong royong, Majelis Taklim, dan nilai-nilai kearifan lokal).

Asumsi tersebut cenderung sesuai apa yang dikonsepsikan oleh Sayogyo dan Kuntjaraningrat bahwa secara potensial setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut. Potensi kesejahteraan sosial tersebut ada dalam bentuk sumber daya alami, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial yang berupa kemampuan mengorganisir sumber daya alam atau manusia atau perpaduan keduanya. Untuk mempertahankan kehidupannya, masyarakat memanfaatkan dan mengorganisasikan semua sumber daya ini dalam berbagai aktivitas seperti aktivitas ekonomi, politik, keagamaan, kesenian, gotong royong dan sebagainya. Pemanfaatan dan pengorganisasian aktivitas ini diistilahkan sebagai lembaga (institusi) sosial. Pengertian lembaga di sini mencakup bentuk-bentuk organisasi/kelompok kongkrit dan pranata sosial. Masyarakat lokal dalam lembaga sosialnya, mengorganisir diri untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan uluran tangan pihak luar (pemerintah atau swasta) yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara umum mengatasi masalah kesejahteraan sosial secara khusus. Kemampuan setiap lembaga sosial untuk melindungi masyarakatnya dari setiap masalah kesejahteraan sosial ditentukan oleh norma, kelakuan berpola, peralatan dan anggota masyarakat pendukung lembaga tersebut (Koentjaraningrat, 2004).

BAB V REKOMENDASI

1. *Need assessment* dan *potencies assessment* menjadi dasar menyusun program dan kegiatan

Untuk memberdayakan masyarakat, mutlak diperlukan untuk memerhatikan kondisi setempat. Masing-masing desa sampel memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Tentang bagaimana mengelola potensi dalam mengatasi masalah yang ada, masyarakat sudah mengetahui caranya. Dengan demikian dukungan dari pihak luar adalah memfasilitasi dan membimbing bagaimana agar cara yang ditetapkan oleh masyarakat setempat dapat mencapai tujuan yang ada. Pihak kaum akademis membimbing bagaimana merencanakan dan menyusun langkah yang perlu dirancang. Kemudian pihak pemerintah memberikan stimulasi dan memfasilitasi agar rencana yang ditetapkan oleh masyarakat melalui musyawarah perencanaan desa dapat terwujud. Kemudian perlu dilibatkan pihak dunia usaha untuk memberikan dukungannya.

2. Partisipasi masyarakat dalam desa membangun. Partisipasi ini dilakukan dalam lima kelompok besar, yang meliputi:
 - a. Memiliki sumber daya dan pengetahuan untuk berpartisipasi;
 - b. Memiliki perasaan untuk menguatkan partisipasi, peran serta masyarakat;
 - c. Terdapat kesempatan, kemauan untuk berpartisipasi;
 - d. Mobilisasi melalui agensi public dan saluran masyarakat; dan
 - e. Membuktikan bahwa pandangannya, pendapatnya, idenya bisa dipertimbangkan

Masyarakat setempat dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial lokal (*local social system*). Pandangan ini

dicakup oleh konsep sosiologis mengenai lokal (*locale*) yang dikemukakan oleh Giddens artinya suatu masyarakat setempat selain menempati ruang (*space*) juga mempunyai sistem nilai, jaringan sosial serta dinamika aktifitas sehari-hari (*everyday life*). Masyarakat setempat inilah yang menjadi basis penempatan sosialisasi individu sebagai anggota komunitas, ajang pembentukan ciri keluarga, dan terbentuknya ras kebersamaan di antara para anggotanya. Sebagai suatu entitas sosial yang solid, warga komunitas mempunyai harapan, pandangan serta pengertian yang relatif sama tentang suatu hal. Demikian halnya mengenai partisipasi masyarakat. Masyarakat setempat mempunyai pengertian, pandangan dan aspirasi-aspirasi mengenai partisipasi mereka dalam proyek pembangunan.

3. Keterpaduan

Spatial planning sangat direkomendasikan. Untuk pihak Kementerian Sosial yang telah menetapkan kebijakan agar kegiatan RS-RTLH, sarling dan pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan KUBE, perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan lainnya yang juga diarahkan pada satu titik konsentrasi pada satu desa yang ditetapkan bersama.

Untuk pemerintah kabupaten perlu memerhatikan desa sasaran yang ditetapkan bersama. Salah satunya adalah mengarahkan program dan kegiatannya pada sasaran dimaksud. Untuk ini telah ada kesanggupan dari para peserta di 4 wilayah yang dilakukan diskusi pada akhir tahapan pengumpulan data, bahwa tiap satker di kabupaten akan mengarahkan pada desa di wilayah yang telah disepakati dalam MoU Kementerian Sosial dengan 14 Universitas.

4. Keterlibatan ABG

Keterlibatan akedemisi, dunia usaha dan pemerintah perlu terus digalakkan dalam menjalin sinergitas program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Irwan, dan Abdul Aziz Saleh (2001), *Pentingnya Jaminan Sosial dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, dalam Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Franz von Benda-Beckmann, dkk, Ed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Admihardja, Kusnaka & Harry Hikmat, (2003). *Participatory Research Appraisal: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Agusta. I., & Fujihartanto. (eds.). (2014). *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chamala, R.S. (1995). *Overview of Participative Action Approches in Australian Land and Water Management. Dalam Chamala, S. and Keith K (eds). 1995. Participative Approaches for Landcare: Perspective, Politicies, Program*. Brisbane: Australian Academic Press.
- Chambers. Roberts, (1992). *Rural Appraisal, Rapid Relaxed and Participatory*. Inst. Dev Studies Univirsity of Sussex, England.
- Chambers, Robert, (1996). *PRA (Participatory Rural Appraisal) Memahami Desa Secara Partisipasif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hikmat, Harry. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humaniora Utama. Bandung.
- Muksin, 2015. Mengawal Dana Desa, *Kompas*, 10/Januari/2015.
- Mukhaer Pakkanna, 2008, Penguatan Ekonomi Desa, dalam *Kompas*, 05/09/2008.

- Nuryana. Mu'man., (2002), Peranan Social Capital Sebagai Piranti Sosial Komunitas Dilihat dari Dimensi Teoritis dan Empiris, dalam *INFORMASI Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, Vol. 7, No.2.
- Pratchett, Lawrence et al.2009. *Empowering Communities to Influence Local Decision Maker (Evidence based lessons for policy makers and practitioners)*. United Kingdom: University Southampton.
- Solekhan. Moch., (2012), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara, Malang
- Soleh. Chabib., (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Jakarta: Fokusmedia
- Wuryandari. Ani. (2010). Partisipasi Masyarakat Untuk Mengembangkan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Sido Makmur Kecamatan Wai Panji Kabupaten Lampung Selatan, Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Magister Ilmu Kesejahteraan, Universitas Indonesia, Jakarta.

SEKILAS PENULIS

B. MUJIYADI, menamatkan program S1 dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Master of Social Work dari La Trobe University, Melbourne, Australia. Saat ini menjabat Peneliti Madya pada Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial. Selain itu juga sebagai anggota Pembina Ilmiah pada lembaga yang sama. Penelitian yang pernah dilakukan meliputi topik-topik yang berkaitan dengan Gelandangan dan Pengemis, Anak Jalanan, Lanjut Usia, Penanganan Masalah Sosial Melalui Panti, Penyusunan Indikator Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Sektor Industri, Tanggung Jawab Dunia Usaha bagi Masyarakat di sekitarnya, Model Pemberdayaan Keluarga dalam Pencegahan Tindak Tuna Sosial Remaja di Perkotaan, Subsidi BBM bagi Panti Sosial, *Social Work With Migrant Worker*, Pelayanan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan, Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penelitian Pola Multi Layanan pada Panti Sosial Penyandang Cacat, Sikap Masyarakat terhadap Trafficking Anak di Daerah Pengirim, Profil Pendamping dalam Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum, Studi tentang Penanganan Pekerja Migran Domestik Bermasalah dan Keluarganya, Kearifan Lokal Dalam Penanganan Korban Bencana, Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri dan Pemetaan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selain itu pernah mengikuti berbagai kursus dan seminar di dalam dan luar negeri yang meliputi topik *Social Development*, *Social Work With Migrant and Refugee*, *Community Based Rehabilitation for Disabled Persons*, *Micro Planning for Poverty Reduction and Sustainable Development*, *Senior Social Welfare Administrators*, dan lain-lain. Demikian juga pernah menjadi anggota Pokja MPMK, Pokja JPS, Penyusunan Repelita VII bidang Kesejahteraan Sosial, penyusunan Renstra Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2000-2004, dan Renstra Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2004-2009, dan Renstra Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2009-2014. Selain

itu, pernah menjadi pembicara anggota tim konsultan dalam Penelitian Penanggulangan Kemiskinan di Balitbangda Provinsi Banten, Anggota Tim Konsultan Penyusunan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Timur, pembicara dalam topik keserasian sosial dalam menuju *livable city* di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pembicara dalam topik Menyambut MEA di STKS Bandung. Pengalaman lainnya adalah bekerja sama dengan *ADB*, *Save the Children UK*, *UN DSA*, *JICA* dan beberapa lembaga lain dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan sosial. Demikian juga pernah mengikuti kursus *Poverty Alleviation di National Institute for Rural Development* di Hyderabad, India; serta mengikuti kursus JICWEL di TIC, Tokyo, Japan.

MOCHAMAD SYAWIE, menamatkan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Sosiologi Gadjah Mada Yogyakarta; dan S2 dari Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Program Studi Sosiologi. Saat ini menjabat Peneliti Utama pada Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial. Berikut adalah riwayat pekerjaan yang pernah dilalui:

- 1984 - 1986 Kanwil Depsos Provinsi Lampung, 1986-1987 Petugas Sosial Kecamatan (PSK) di Kecamatan Padangratu Lampung Tengah.
- 1988 - 1994 Balai Besar Penelitian Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta.
- Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta (1995 sampai sekarang-2012).
- Pernah mengajar di STIE IBII Jakarta, STIE Trisakti Jakarta (1998- 2001).
- Peneliti pada Pusat Penelitian Kesos Badan Litbang Kementerian. Sosial Jakarta. Peneliti pada Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial, Jabatan terakhir Peneliti Madya di Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badiklit Kessos

Kementerian. Sosial (2002 – sampai sekarang).

- Anggota Redaksi Jurnal Ketahanan Sosial Masyarakat (2004 – 2010).
- Anggota Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) Kementerian. Sosial 2012-2014), juga pernah menjabat Sekretaris TP2I (2009-2011).
- Aktif menulis pada jurnal ilmiah (JURNAL, INFORMASI, dan TANSOSMAS, JURNAL Ekonomi Trisakti).
- Menjadi Editor dalam beberapa penelitian.

Adapun penelitian yang sudah dilakukan meliputi; Masyarakat Berketahanan Sosial Perspektif Multikultural, Struktur-Struktur Mediasi Dalam Masyarakat Berketahanan Sosial, Pemetaan Pranata Sosial Pada Komunitas Lokal, Jaringan Ketahanan Sosial Masyarakat, Model Pengembangan dan Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat; Masalah Kebutuhan Dan Sumber Daya Di Daerah Teringgal.

Selain itu, aktif mengikuti seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan metode penelitian dan yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan sosial masyarakat.

ANWAR SITEPU, lahir di Sumatera Utara, 4 September 1958, menjadi peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial sejak 1999. Saat ini menjabat Peneliti Madya, sedang mendalami penanganan penanganan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBe). Pernah bekerja sebagai pekerja sosial untuk Yayasan Sosial Pelita Kasih di Tanjung Priok, Jakarta Utara, 1982 sampai 1986. Memperoleh gelar sarjana kesejahteraan sosial dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri di Jakarta tahun 1986 dan Magister Profesional Pengembangan Masyarakat dari Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2004. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah: Survey Kesejahteraan Sosial Dasar (2015); Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri (2014); Survey Kekerasan terhadap Anak (2013); Studi Kebijakan Program

Keluarga Harapan (2012); Studi Pendahuluan Kriteria Fakir Miskin (2011); Pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan (2010, 2011, 2012); Penelantaran, Pengucilan dan Kerentanan Anak di Jakarta Barat (2010); Evaluasi Pelayanan Sosial Melalui Panti Sosial Bina Remaja (2010); Evaluasi Model Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (2009); Pengembangan Pusat Layanan Sosial (2009); Teknik partisipatori pemeringkatan keluarga menurut sosial ekonomi (2009).

SUYANTO, Lahir di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 10 Desember 1958. Memperoleh Gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 1989. Saat ini menjabat Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

Penulis sering menulis berbagai artikel yang diterbitkan di media/Jurnal atau Buku. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, yaitu:

- Penelitian Evaluasi Program Rehabilitasi Penyandang Cacat Di Loka Bina Karya, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, Jakarta. 1998.
- Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat di Loka Bina Karya (Studi Kasus di DKI Jakarta). Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI. Jakarta.Tahun 1997.
- Pemberdayaan Melalui Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kotawaringin Timur). Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI. Jakarta.Tahun 1999.
- Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Industri Terhadap Sikap Masyarakat Atas Keberadaan Industri. Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI. Jakarta.Tahun 2002.

- Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bimbingan Sosial Keluarga. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta. Tahun 2003.
- Model Bimbingan Sosial Bagi TKSM Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat (Pengembangan Konsep dan Uji Coba). Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta. Tahun 2003.
- Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bimbingan Sosial Keluarga. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta. Tahun 2003.
- Model Bimbingan Sosial Bagi TKSM Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat (Pengembangan Konsep dan Uji Coba). Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta. Tahun 2003.
- Model Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal Dalam Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat (Replikasi). Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta. Tahun 2005.
- Pemetaan Pranata Sosial Pada Komunitas Lokal di Daerah Perkotaan, Pedesaan dan Komunitas Adat Terpencil. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta. Tahun 2006.
- Diagnosa Permasalahan Sosial di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta. Tahun 2006.

- Komunitas Adat Terpencil. Kantor Sosial dan PMD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006.
- Pemetaan Sosial di Kabupaten Nunukan Kaltim, Puslitbang Kessos, 2007.
- Pemetaan Sosial di Kabupaten Pulang Pisau Kalteng, Puslitbang Kessos, 2007.
- Kearifan Lokal Komonitas Teluk Bakung Di Pedalaman Pontianak. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, tahun 2009.
- Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, tahun 2009.
- Kube Dalam Perspektif Ketahanan Sosial Keluarga, Tahun 2009.
- Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Paska Pemutusan Hubungan Kerja Tahun 2009.
- Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tertinggal Melalui Pengembangan Ekonomi Pedesaan (Studi Kasus di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat), Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial. Tahun 2010.
- Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal: Identifikasi Kebutuhan, Sumberdaya dan Permasalahan Masyarakat desa Jambu & Desa Engkangin-Kalimantan Barat serta Desa Sendangmulyo dan Desa Mlatirejo Jawa Tengah Tahun 2010.
- Masalah, Kebutuhan dan Sumberdaya di Daerah Tertinggal Studi Kasus di Sepuluh Kabupaten Tertinggal Tahun 2011.
- Pemberdayaan Keluarga Miskin di Sekitar Industri Pertambangan Tahun 2011.
- Kesiapan Komunitas Dalam Pengendalian Konflik Sosial (Studi(Studi Kasus di tiga Kota). Tahun 2011.
- Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial Studi Evaluasi Bantuan

Stimulan Bahan Bangunan Rumah Berupa Uang Melalui Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Tahun 2012.

- Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Paska Pemutusan Hubungan Kerja” (Studi Kasus Industri Tekstil diKecamatan Dayeukolot, Kabupaten Bandung-Jawa Barat). Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial 2010.
- Studi Kebijakan Pengembangan Sinergitas Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Di Nusa Tenggara Timur. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, tahun 2013.

AYU DIAH AMALIA, lahir pada 6 Februari 1983 di Jakarta. Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI. Menamatkan pendidikan di Universitas Indonesia, Program Studi Sosiologi (2006) dan pendidikan Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Konsentrasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Sosial Univeritas Indonesia Tahun 2013. Kepakaran Peneliti: Sosiologi - Pengkajian Dampak Sosial dan Evaluasi Program. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan bersama Tim diantaranya: Studi Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Alam Melalui TAGANA, Kontribusi Organisasi Sosial Terhadap Pembangunan Sosial, Evaluasi Indikator Utama Kementerian Sosial, Studi Kepuasan KPM Terhadap Fungsi Ewarong, serta penelitian mandiri; Pelaksanaan *Program Elderly Day Care Services* di PSTW Budhi Dharma Bekasi, Evaluasi Outcomes Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra di PSBN Wyata Guna Bandung.

INDEKS

B

Borisallo v, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 37, 41, 42, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 60, 74, 76,
77

D

Data Demografi iv, 15

Data Ekonomi ix, 22

Data Geografi ix, 18

Data Kesehatan ix, 44

Data Kondisi Sosial Budaya ix, 39

Data Pendidikan ix, 46

Data Psikografis ix, 50

Data Stakeholder ix, 53

Desa a, b, iii, iv, v, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30,
31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 81, 82,
83, 85, 88

Desa Sejahtera Mandiri a, b, iii, iv, 2, 3, 4, 5, 13, 58, 61, 62, 70, 83, 85

K

Kearifan Lokal iii, iv, vii, 2, 12, 15, 42, 54, 55, 63, 77

Kesejahteraan Sosial 3, 6, 7, 10, 11, 13, 78, 85

Keswadayaan Masyarakat 13, 61

Ketahanan Sosial 84, 85, 87, 88

Komunikasi iii, vi, vii, 8, 14, 51, 52, 55, 56, 57, 62

L

Lembaga Sosial 2, 11, 13, 41, 61, 70, 78

M

Mestong v, 21, 30, 38, 42, 46, 49, 53, 55, 57, 60

Modal Sosial iii, iv, vii, 15

N

Nawa Cita iii, iv, 5, 6

Nyogan v, 21, 22, 30, 38, 42, 43, 44, 46, 49, 53, 55, 57, 77

P

Pandansari v, 19, 23, 24, 33, 34, 36, 39, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 56, 59, 60, 71, 73,
74

Partisipasi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 35, 40, 48, 61, 63, 66, 67, 68, 71, 79, 80

Pemaluan v, 18, 22, 31, 32, 33, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 55, 56, 59, 60, 70

Pemberdayaan 12, 13, 16, 28, 53, 54, 55, 61, 77, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89

Pemberdayaan Pranata Sosial 12

Pemetaan a, b, iii, iv, 13, 14, 18, 83, 85, 87, 88

Pola Komunikasi iv, ix, 15, 55

Potencies Assessment 79

Produk yang mempunyai daya saing iii, 14

Psikografi iv, 15

S

Stakeholder iv, 15